



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR



dr. ARDITO WIJAYA, M.K.M

Bupati Lampung Tengah
Periode 2025 - 2030

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Lampung Tengah, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai media pertanggungjawaban atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah secara berkelanjutan, sehingga laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum Laporan Kinerja (Lkj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini memuat informasi tentang Perencanaan dan Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Periode 2021-2026, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta juga memuat pertanggung jawaban aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja di tahun mendatang, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Gunung Sugih, 03 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



ARDITO WIJAYA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini merupakan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai perwujudan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah **“MEWUJUDKAN RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA”**,

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa;

3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan;
4. Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024, maka dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sebagai berikut :

Misi 1, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Indek Pembangunan Gender pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 91,08 persen dengan realisasi sebesar 90,02 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,84 persen.
- Presentase cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 25 persen dengan realisasi sebesar 6,06 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 24,24 persen.
- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 44,58 persen dengan realisasi sebesar 48,29 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 108,32 persen.
- Rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 ditargetkan 9,55 tahun dengan realisasi sebesar 7,97 tahun atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 83,46 persen.
- Lama harapan sekolah pada tahun 2024 ditargetkan 13,04 tahun dengan realisasi sebesar 13,17 tahun atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,99 persen.
- Usia Harapan hidup pada tahun 2024 ditargetkan 74,17 tahun. Realisasi sebesar 74,38 tahun atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,28 persen.

- Prevalensi stunting pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 7,6 persen dengan realisasi 7,6 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.
- laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 1,5 persen dengan realisasi sebesar 1,12 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 74,67 persen.
- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 60 persen dengan realisasi sebesar 62,16 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 103,6 persen.

Misi 2, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Keberhasilan pembangunan dibidang prasarana jalan dilihat dari jalan kabupaten yang kondisinya baik. Prosentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 59,62 persen dengan realisasi sebesar sebesar 46,11 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 77,34 persen.
- Prosentase Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 89,45 persen dengan realisasi sebesar 89,45 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.
- Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 85 persen dengan realisasi sebesar 72 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 84,71 persen.
- Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,6 dengan realisasi sebesar 0,26 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 156,67 persen.
- Prosentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2 pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 60 persen dengan realisasi sebesar 57,41 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,68 persen.

- Jumlah prosentase luas kawasan kumuh pada tahun 2024 ditargetkan menurun menjadi sebesar 7 persen dengan realisasi sebesar 6,86 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102 persen.
- Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2024 ditargetkan menurun menjadi sebesar 5,5 persen dengan realisasi sebesar 4,66 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 115,27 persen.
- Prosentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman pada tahun 2024 ditargetkan meningkat menjadi sebesar 94,35 persen dengan realisasi sebesar 94,8 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,48 persen.
- Prosentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman pada tahun 2024 ditargetkan meningkat menjadi 96,35 persen dengan realisasi sebesar 94,32 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,89 persen.
- Indeks kualitas air di Tahun 2024 ditargetkan 58,64 IKA dengan realisasi sebesar 58,89 IKA atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100,43 persen.
- Indeks kualitas udara di Tahun 2024 ditargetkan 84,28 IKU dengan realisasi sebesar 86,24 IKU atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 102,33 persen.
- Indeks tutupan lahan di Tahun 2024 ditargetkan 31,47 TL dengan realisasi sebesar 26,43 TL atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 83,98 persen.
- Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang pada tahun 2024 ditargetkan meningkat menjadi 82 persen dengan realisasi sebesar 77 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,90 persen.

Misi ke-3, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Score PPH (Pola Pangan Harapan) pada tahun 2024, ditargetkan 88,2 persen dengan realisasi sebesar 93,7 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,24 persen.
- Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, perikanan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 37 persen dengan realisasi sebesar 31,57 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85,32 persen.
- Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 12 persen dengan realisasi sebesar 13,05 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108,75 persen.
- Pertumbuhan ekonomi sektor industri non migas pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 23,7 persen dengan realisasi sebesar 22,99 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97 persen.
- Prosentase peningkatan volume usaha koperasi pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 11 persen dengan realisasi sebesar 10,27 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,36 persen.
- Rasio Kemandirian Fiskal pada tahun 2024 ditargetkan 8 persen dengan realisasi sebesar 9,03 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 112,88 persen.
- Prosentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2024 ditargetkan 31 persen dengan realisasi sebesar 30,42 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,13 persen.
- Indeks desa membangun pada tahun 2024 ditargetkan 0,756 dengan realisasi sebesar 0,749 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,07 persen.
- Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2024 ditargetkan 74,33 persen dengan realisasi sebesar 73,51 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,89 persen.

- Prosentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1 pada tahun 2024 ditargetkan 16 persen dengan realisasi sebesar 18,83 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 117,69 persen.

Misi ke 4, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2024 jumlah kejadian konflik sosial ditargetkan sebesar 0 kasus dengan realisasi sebanyak 1 kasus dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.
- Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda Tahun 2024 ditargetkan 10 persen, realisasi sebesar 10 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.
- Indeks resiko bencana di Tahun 2024 ditargetkan kategori sedang dengan realisasi kategori sedang atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

Misi ke 5, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 ditargetkan mendapatkan WTP dengan realisasi WTP atau dengan nilai capaian kinerja 100 persen.
- Indeks SPBE di Tahun 2024 ditargetkan 2,5 dengan realisasi sebesar 2,68 atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 107,2 persen.
- Nilai akuntabilitas kinerja adalah nilai hasil evaluasi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Tahun 2024 ditargetkan nilai B dengan realisasi nilai B atau dengan nilai capaian kinerja 100 persen.
- Indeks inovasi daerah di Tahun 2024 ditargetkan mendapatkan predikat inovatif, dengan realisasi inovatif atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.
- Indeks profesionalitas ASN di Tahun 2024 ditargetkan 62 dengan realisasi sebesar 74,89 atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 102,79 persen.

- Indek kepuasan masyarakat pada tahun 2024 ditargetkan mendapatkan nilai 88,81 dengan realisasi sebesar 86,36 atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 97,24 persen.

Secara umum keseluruhan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 telah berhasil dicapai dan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun didalam pelaksanaan masih dijumpai permasalahan dan kendala, namun secara umum dapat diatasi secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang berarti dalam pencapaian target sasaran tersebut. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul pada Tahun yang akan datang, telah dilakukan langkah-langkah antisipasi terutama meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program, baik dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB. I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1-1
2. Dasar Hukum	I-3
3. Maksud dan tujuan	I-5
4. Kondisi Geografis Daerah	I-6
5. Kondisi Umum Demografi.....	I-12
6. Kondisi Ekonomi.....	I-13
7. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	I-22
8. Isu-Isu Strategis.....	I-26
9. Sistematika Laporan.....	I-33
BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024	
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021-2026	II-1
2. Penetapan Kinerja Tahun 2024	II-26
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Kinerja.....	III-1
1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021...	III-1
1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	III-7
1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja	

Dengan Target Jangka Menengah.....	III-12
1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan	
Target Nasional.....	III-15
1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	III-26
1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber	
Daya.....	III-124
1.7 Analisis Program dan Kegiatan Yang	
Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	III-129
2. Realisasi Anggaran.....	III-134

BAB. IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	IV-1
2. Saran-Saran	IV-3

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	I-9
Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2019-2024	I-19
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi I Tahun 2024	III-2
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi II Tahun 2024	III-3
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi III Tahun 2024	III-5
Tabel 3.4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi IV Tahun 2024	III-6
Tabel 3.5 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi V Tahun 2024	III-7
Tabel 3.6 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi I	III-8
Tabel 3.7 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi II	III-9
Tabel 3.8 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi III	III-10
Tabel 3.9 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi IV	III-11
Tabel 3.10 Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi V	III-11
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RPJMD	III-12
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional	III-16
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2024	III-125

Tabel 3.14	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2024	III-129
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Misi I Tahun 2024	III-135
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Misi II Tahun 2024	III-136
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Misi III Tahun 2024	III-138
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Misi IV Tahun 2024	III-141
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Misi V Tahun 2024	III-142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun Anggaran. Laporan Kinerja (LKj), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal Tahun Anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut

menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun LKj Tahunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara No.091), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor: 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3825);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2023 kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Laporan kemajuan (*Progress Report*) secara nyata, jelas, dan transparan atas pelaksanaan program kerja/ kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten

Lampung Tengah berdasarkan tolok ukur Renstra/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program kerja guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.4. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1.4.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Bersamaan dengan pembentukan tersebut, juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih.

Lampung Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 46 meter diatas permukaan laut, Luas wilayah Lampung Tengah, adalah berupa daratan seluas 4559,57 km², Pada tahun 2023, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 wilayah kecamatan, berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu: Padang Ratu (164,00km²), Selagai Lingga (272,63 km²), Pubian (187,40 km²), Anak Tuha (162,68 km²), Anak Ratu Aji (70,22 km²), Kali Rejo

(111,90 km²), Sendang Agung (97,90 km²), Bangun Rejo (104,8 km²), Gunung Sugih (164,01 km²), Bekri (94,15 km²), Bumi Ratu Nuban (63,71 km²), Trimurjo (64,18 km²), Punggur (60,70 km²), Kota Gajah (49,60 km²), Seputih Raman (130,00 km²), Terbanggi Besar (217,15 km²), Seputih Agung (106,96 km²), Way Pengubuan (214,48 km²), Terusan Nunyai (289,69 km²), Seputih Mataram (115,96 km²), Bandar Mataram (1017,89 km²), Seputih Banyak (136,62 km²), Way Seputih (62,34 km²), Rumbia (118,39 km²), Bumi Nabung (97,75 km²), Putra Rumbia (93,38 km²), Seputih Surabaya (141,55 km²), Bandar Surabaya (138,09).

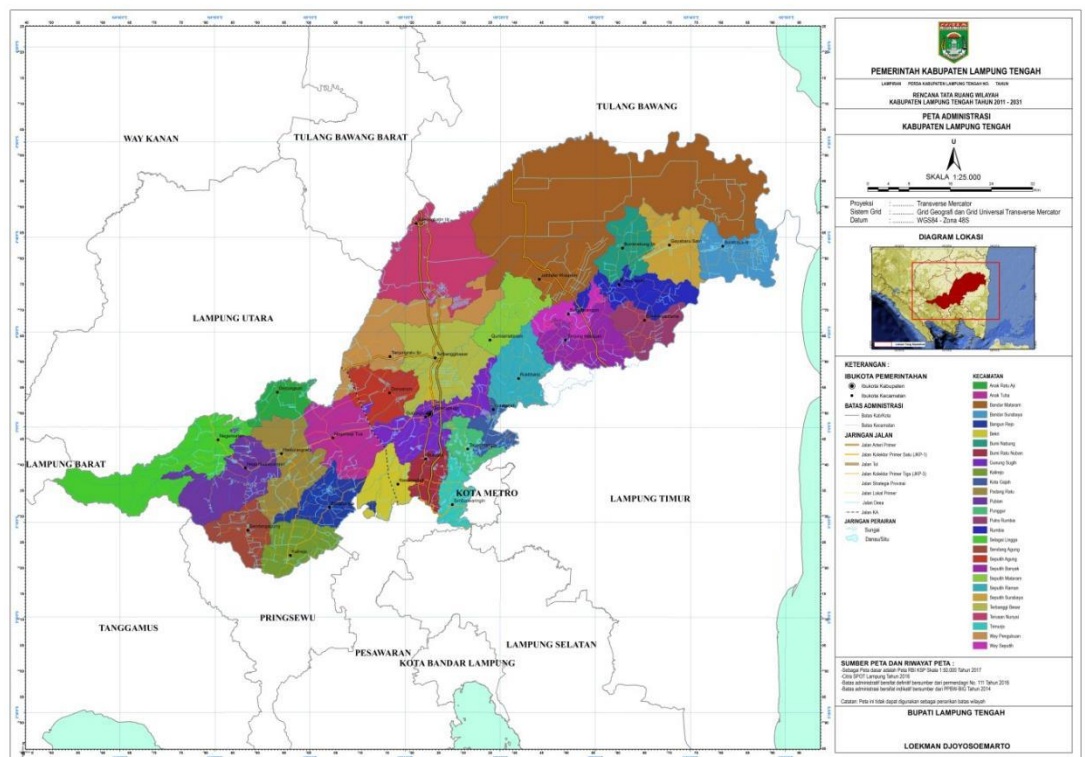
Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 4°30" sampai dengan 4°15' Lintang Selatan dengan ibukota di Kota Gunung Sugih.

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Selatan.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 1017,89 km² sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Bumi Ratu Nuban seluas 63,71 km².

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Tabel 1.1
Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
			km ²	%	Kampung	Kelurahan
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	164,00	3,61	15	-
2	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	70,22	1,54	6	-
3	Selagai Lingga	Negri Katon	272,63	6,00	14	-
4	Pubian	Negri Kepadungan	187,40	4,12	20	-
5	Anak Tuha	Negara AjiTua	162,68	3,58	12	-
6	Kalirejo	Kalirejo	111,90	2,46	17	-
7	Sendang Agung	Sendang Agung	97,90	2,15	9	-
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	104,88	2,31	17	-
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	164,01	3,61	11	4
10	Bekri	Kusumadadi	94,15	2,07	8	-
11	BumiRatu Nuban	Bulusari	63,71	1,40	10	-
12	Trimurjo	Simbarwaringin	64,18	1,41	11	3
13	Punggur	Tanggul Angin	60,70	1,34	9	-
14	Kota Gajah	Kota Gajah	46,90	1,03	7	-
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	130,00	2,86	14	-
16	Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	217,15	4,78	7	3
17	Seputih Agung	Dono Arum	106,96	2,35	10	-
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	214,48	4,72	8	-
19	Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	289,69	6,37	7	-
20	Spt. Mataram	Kurnia Mataram	115,96	2,55	12	-
21	Bdr. Mataram	Jati Datar	1.017,89	22,39	9	-
22	Spt. Banyak	Tanjung Harapan	136,62	3,01	13	-
23	Way Seputih	Suko Binangun	62,34	1,37	6	-
24	Rumbia	Reno Basuki	118,39	2,60	9	-
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	97,75	2,15	7	-
26	Putra Rumbia	Binakarya Utama	93,38	2,05	10	-
27	Spt.Surabaya	Gaya Baru Satu	141,55	3,11	13	-
28	Bdr.Surabaya	Surabaya Ilir	138,09	3,04	10	-

Sumber data: Revisi RTRW KABupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

1.4.2. Kondisi Topografi

Secara Topografi Lampung Tengah dapat dibagi 5 (lima) bagian yaitu :

- Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung.
Daerah ini terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dengan ketinggian rata-rata 1.600 mdpl.
- Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang.
Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300-500 mdpl.
- Daerah Dataran Aluvial.
Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25-75 mdpl dengan kemiringan 0%-3%.
- Daerah Rawa Pasang Surut.
Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5-1 mdpl
- Daerah River Basin.
Kabupaten Lampung Tengah memiliki 3 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selangai Lingga.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%). Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).
- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga dan Sendang Agung.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dikelompokkan menjadi 5 golongan yaitu:

- **Tanah Usaha Khusus I.**

Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0 – 7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terus-menerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.

- **Tanah Usaha Utama IA dan B**

Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar

dan pada ketinggian ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.

- **Tanah Usaha Utama IC**

Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa diairi relatif berkurang.

- **Tanah Usaha Utama ID**

Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.

- **Tanah Usaha Utama II**

Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

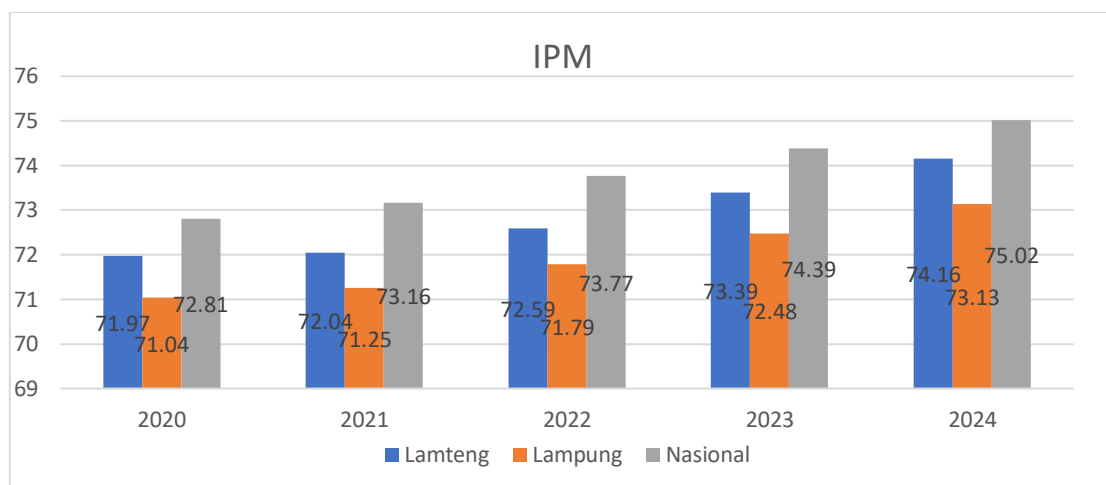
1.5. KONDISI UMUM DEMOGRAFI

1.5.1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2024 berdasarkan proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2035 (ribu) berjumlah 1525,09 jiwa. Komposisi penduduk Tahun 2024 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 777,25 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 747,84 ribu jiwa.

1.5.2. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2020-2024 mengalami kemajuan yang signifikan, seperti gambar dibawah ini:



Kinerja IPM Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 berhasil mendekati IPM Nasional dan menjadi yang Kabupaten terbaik kedua di Provinsi Lampung yaitu 74,16. Dengan komposit IPM Lampung Tengah terdiri dari:

Umur Harapan Hidup	: 74,38 Tahun
Pengeluaran Per Kapita Per Tahun (Ribu Rupiah)	: Rp. 12.595
Harapan Lama Sekolah	: 13,17 Tahun
Rata-rata Lama Sekolah	: 7,97 Tahun

1.6. KONDISI EKONOMI

1.6.1. Pertanian Tanaman Pangan

Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tahun 2023 – 2024

No.	KOMODITAS	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (Ton)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Padi	111.926,50	111.926,50	108.485	108.889	54,23	55,19	588.384,90	600.907
2.	Jagung	81.772	81.772	77.523	75.846	70,31	70,95	553.862	538.091
3.	Ubi Kayu	106.265	106.265	102.914	102.223	328,87	326,73	3.384.492	3.339.978

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Tengah Tahun 2024

Produksi komoditas padi mengalami penurunan sebesar 3,98 persen yaitu dari 608.009 ton pada tahun 2023 menjadi 600.907 ton tahun 2024. Produksi komoditas Jagung mengalami penurunan produksi sebesar 20 persen yaitu dari 540,115.00 ton pada tahun 2023 menjadi 650.924 ton pada Tahun 2024. Produksi Ubi Kayu menurun sebesar 29,61 persen yaitu dari 3.384.492 ton pada tahun 2023 menjadi 3.339.978 ton pada tahun 2024.

Selain tanaman padi, jagung dan ubi kayu, kabupaten Lampung Tengah juga penghasil cabe dan Bawang Merah

No.	KOMODITAS	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Cabe besar	427,25	801,28	510,25	693,63	36.727,70	43.506,19
2.	Cabe kecil	219,00	399,92	197,75	274,67	10.917,77	9.546,60
3.	Bawang merah	46,00	1,75	45,50	17,25	1.766,00	780,90

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah (Angka Sementara) Tahun 2024

1.6.2.Perkebunan

Komoditas perkebunan yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah diantaranya komoditas kelapa sawit, kakao, karet, tebu, lada dan kelapa dalam.



Tabel 3.12. Target dan Pencapaian Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2023-2024 (Kebun Rakyat)

No	Komoditas Perkebunan	Realisasi 2023			Target 2024			Realisasi 2024		
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Kelapa Sawit	19.177	43.153	3.130	15.035	50.892	3.385	17.177	45.656	3.600
2.	Karet	11.549	4.987	1.291	5.365	5.338	995	11.569	5.160	930
3.	Kakao	5.274	3.050	977	4.008	3.367	840	5.274	3.192	790
4.	Tebu	9.454	69.109	18.251	8.993	67.284	7.482	9.454	709.145	75.010
5.	Lada	161	112	3.897	123	106	862	131	114	880
6.	Kelapa Dalam	6.981,25	6.281	1.052	5.959	7.514	1.261	7.001	6.619	1.100

Sumber: LAMP Disubmakan Tahun 2024

Pada tahun 2024 produksi komoditas tanaman Kelapa Sawit mencapai 45.656 ton atau kurang 5.236 ton dari target yang telah ditentukan sebesar 50.892 ton atau tercapai 89,71 persen, hal ini disebabkan adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sedang berjalan sehingga produksi menurun.

Produksi Karet tahun 2024 mencapai 5.160 ton atau kurang 178 ton dari target yang telah ditentukan sebesar 5.338 ton atau tercapai 96,67 persen, hal ini disebabkan adanya banyak tanaman yg di tebang karena usia tanaman.

Produksi Kakao tahun 2024 mencapai 3.192 ton atau kurang 175 ton dari target yang telah ditentukan sebesar 3.367 ton atau tercapai 94,81 persen, hal ini disebabkan adanya ada pengurangan tanaman, perawatan kurang, hama dan penyakit, akibat harga di tahun sebelumnya tidak maksimal.

Produksi Tebu tahun 2024 mencapai 709.145 ton atau meningkat 641.861 ton dari target yang telah ditentukan sebesar 67.284 ton atau tercapai 1.053,96 persen, hal ini disebabkan adanya pemeliharaan yang intensif oleh petani dan harga yang cukup tinggi.

Produksi Lada tahun 2024 mencapai 114 ton atau meningkat 8 ton dari target yang telah ditentukan sebesar 106 ton atau tercapai 107,09 persen, hal ini disebabkan adanya pemeliharaan yang intensif oleh petani dan harga yang cukup tinggi di bandingkan tahun sebelumnya.

Produksi Kelapa Dalam Tahun 2024 mencapai 6.619 atau kurang 895 ton dari target yang telah ditentukan sebesar 7.514 ton atau tercapai 88,09 persen, hal ini disebabkan adanya pemeliharaan yang intensif oleh petani dan harga yang cukup tinggi dan permintaan yang terus meningkat.

1.6.3. Peternakan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan ternak besar maupun kecil. Berdasarkan pencapaian dari sasaran strategis di bidang pertanian (subsektor peternakan) dapat dilihat dari perkembangan jumlah populasi ternak, seperti Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging dan Ayam Ras Petelur.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Populasi Ternak 2023 dan 2024

No.	Jenis Ternak	Populasi Ternak 2023-2024		
		Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Sapi Potong	374.631	422.571	393.363
2.	Kambing dan domba	378.879	326.348	397.823
3.	Ayam Buras	1.048.527	1.097.800	1.079.983
4.	Ayam Ras Pedaging	3.020.702	1.175.752	3.111.323
5.	Ayam Ras Petelur	1.459.218	1.010.974	1.502.995

Sumber: Lakip Disbunnakan Tahun 2024



Angka kematian ternak sapi pada tahun 2024 mencapai 3.934 ekor, dibawah target yang ditetapkan sebesar 4.093 ekor, menurun 159 ekor atau 3,88 persen dibandingkan angka kematian tahun 2023 sebesar 155 ekor, terjadi peningkatan angka kematian pada tahun 2024 disebabkan oleh penanganan ternak yang kurang baik, nutrisi pada pakan ternak yang kurang mencukupi serta kondisi cuaca yang dapat menimbulkan masalah penyakit baru pada ternak

Kematian ternak kambing pada tahun 2024 mencapai 3.780 ekor, dibawah target yang ditetapkan sebesar 4.081 ekor, menurun sebanyak 301 ekor atau 7,38 persen dibandingkan angka kematian tahun 2023 sebesar 171 ekor. Berdasarkan data tersebut terlihat peningkatan angka kematian dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan penanganan ternak kurang baik ditingkat peternak terutama dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pakan ternak.

Kematian unggas terutama ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik pada tahun 2024 mencapai 58.826 ekor, meningkat dari target yang ditetapkan sebesar 51.921 ekor, meningkat 6.905 ekor atau 13.30 persen dibandingkan angka kematian tahun 2023 sebesar 844 ekor, hal ini disebabkan adanya perubahan cuaca cukup ekstrim sehingga banyak memunculkan penyakit baru yang rentan penularan terhadap ternak, kondisi kandang yang kurang bersih serta manajemen pakan yang kurang baik

Pada tahun 2024 jumlah produksi daging mencapai 13.767 ton, menurun capaian target sebesar 6.999 ton dari target yang ditetapkan sebesar 20.766 ton, jika dibandingkan dengan angka capaian pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 276 ton. Hal ini dipengaruhi daya beli masyarakat Kabupaten Lampung Tengah terhadap daging mulai meningkat untuk memenuhi konsumsi protein. Masyarakat juga lebih memilih mengkonsumsi telur (harga lebih terjangkau), kecenderungan juga terjadi karena peternak lebih banyak mengeluarkan ternak hidup ke Kabupaten/Provinsi lain dibandingkan dalam bentuk daging/karkas. Oleh karena itu, agar konsumsi daging meningkat perlu dibangun Rumah Potong Hewan, sehingga produk peternakan yang dikeluarkan dari Kabupaten Lampung Tengah dalam bentuk daging/ tidak dalam bentuk ternak hidup.

Sedangkan untuk produksi telur pada tahun 2024 mencapai 25.601 ton, cukup meningkat signifikan dari

target yang ditetapkan sebesar 10.109 ton, jika di bandingkan dengan capaian pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 746 ton atau meningkat sebesar 3%. Namun demikian minat petani ternak untuk meningkatkan jumlah budidaya ternaknya mengingat kebutuhan/permintaan telur dan konsumsi telur oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan protein bahan pangannya terus meningkat juga dipengaruhi oleh menurunnya jumlah angka kematian pada ternak.

1.6.4. Perikanan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan perikanan seperti kolam, perairan umum, perairan laut, keramba, mina padi maupun tambak. Potensi tersebut dapat dilihat dari jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan
Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Usaha Perikanan (perton)</i>							
1	Kolam	38.724	41.434	42.698	43.965	40.883,10	41.234,01
2	Keramba	1.161	895,3	904,3	913,42	926,67	764,37
3	Perairan Laut	3.473	3.217	3.331	3.188	3.775	3.035
4	Perairan Umum	1.875	1.948	1.851	1.845	2.316	2.551
<i>Produksi Perikanan Berdasarkan Komoditas Unggulan (perton)</i>							
1	Patin	12.967	13.981	14.400	14.842	15.282	14.524
2	Gurame	10.316	10.591	10.909	11.246	7.504	4.966
3	Lele	11.203	11.328	11.668	12.029	12.253	16.016
4	Nila	3.754	4.167	4.292	4.421	4.638	4.430
<i>Konsumsi Ikan</i>							
5	Konsumsi Ikan per kapita	28,9	29,31	30,04	33,32	33,63	35,54
<i>Jumlah Kelompok Perikanan/ Nelayan</i>							
6	Jumlah kelompok perikanan/ nelayan	22	32	35	37	43	43
7	Jumlah kelompok usaha bersama/ nelayan yang mendapat bantuan pemerintah	7	5	7	2	4	3

Sumber Data : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab. Lampung Tengah Tahun 2024

1.6.5. Perindustrian

Potensi bidang industri di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar, hal ini karena didukung oleh ketersediaan potensi bahan baku yang cukup terutama industri yang bergerak pada bidang agribisnis, sampai dengan Tahun 2024 jumlah unit usaha industri sebanyak 5932 unit. dengan total investasi sebesar Rp. 3.433.207.902.106,-.

NO	BIDANG INDUSTRI	JUMLAH INDUSTRI	KAPASITAS PRODUKSI (Ton/pcs/unit/Liter)	NILAI INVESTASI (Rp)	JUMLAH TENAGA KERJA (Orang)
1.	Bidang Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA)	1.348	20.102.201 pcs/ 36.000.261 unit /	9.535.877.796	2.617
2.	Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	4.398	81.795.973.162 Ton	3.422.655.524.310	12.491
3.	Industri Lainnya	186	26.514.801 Ton	1.016.500.000	434
		5.932	81.822.487.963 ton/20.102.201 pcs/36.000.261 unit	3.433.207.902.106	15.542

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kab. Lampung tengah

1.6.6. Perdagangan dan Jasa

Potensi bidang perdagangan dan jasa di Kabupaten Lampung Tengah cukup menjanjikan mengingat letak geografis Kabupaten Lampung Tengah yang cukup strategis, berada ditengah-tengah Propinsi Lampung serta dilintasi oleh Jalan Lintas Trans Sumatera. Selain itu telah dikembangkan kawasan niaga terpadu yang diharapkan dapat menarik investasi dibidang perdagangan dan jasa sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah agar lebih berkembang, serta didukung oleh pusat-pusat perdagangan dan jasa pada

masing-masing kecamatan seperti pasar daerah, pasar kampung dan kios serta toko-toko yang semakin berkembang. Sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan mencapai 27.227 unit.

Pada tahun 2024 jumlah investasi Penanaman modal yang berkembang di Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp 39.597.715.358.326,- lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 30.362.319.958.982 selain itu dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh sektor perbankan yang semakin berkembang baik bank nasional, bank daerah, maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jln. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Kode Pos 34161 Website : http://dpmptsp.lampungtengekab.go.id Email : dpmptsp.kab.lampungtengekab@gmail.com PERKEMBANGAN PMDN & PMA PER 31 DESEMBER 2024										
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perusahaan	54	75	121	155	195	210	282	391	17057
1.	PMA	17	28	31	32	32	32	40	41	53
2.	PMDN	37	47	90	124	163	178	242	350	17004
B.	Jumlah Tenaga Kerja	35.941	36.083	35.981	36.185	36.221	36.371	64.755	68.264	164.228
1.	Indonesia	35.951	35.978	35.981	36.091	36.120	36.270	64.654	68.163	118.399
2.	Asing	60	105	100	194	101	101	101	101	47639
III.	Nilai Investasi	7.262.539.000.000	9.163.726.000.000	10.709.924.000.000	12.403.116.401.000	13.360.918.071.158	14.004.492.171.818	16.944.131.842.058	20.362.319.958.982	39.597.715.358.326
1.	PMA	2.442.348.000.000	3.114.178.004.000	3.115.684.000.000	3.142.138.438.000	3.162.088.489.000	3.162.088.489.000	8.736.832.752.010	10.134.148.214.155	14.743.344.551.927
2.	PMDN	4.820.191.000.000	6.049.548.000.000	7.594.240.000.000	9.260.977.963.000	10.198.829.582.158	10.842.403.682.818	17.207.299.090.048	20.228.171.744.827	24.854.370.806.399
21.	Persentase peningkatan Investasi	20%	17%	16%	8,70	4,80	82,65	17,03	30,42	
22.		1.901.189.000.000	1.592.296.725.000	1.728.770.856.000	1.086.855.210.158	624.481.500.000	11.739.639.370.897	4.418.188.416.927	9.235.395.399.344	
23.		0,262	6,174	5,1615	0,9870	9,9460	0,0265	5,1703	0,3042	
24.		26,18	17,30	16,15	8,70	4,80	82,65	17,03	30,42	
25.										
26.										
27.										
28.										
29.										
30.										
31.	Ket. $\frac{\text{Jumlah nilai Investasi Tahun (n)} - \text{Jumlah nilai Investasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah nilai Investasi Tahun (n-1)}} \times 100 \%$									
32.										
33.										
34.										
35.										

Sumber: DPMPTSP Kab.Lampung Tengah Tahun 2024

1.6.7.Pertambangan

Sesuai dengan formasi geologi dan jenis tanah yang ada, maka Kabupaten Lampung Tengah memiliki deposit mineral yang potensial untuk pengembangan usaha pertambangan terutama bahan tambang galian C. Potensi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung

Tengah diantaranya marmer, granit, andesit, felspart, pasir, diorit, Batu Kapur, Lempung, Pasir Kuarsa dan Pasir Batu (Sirtu).

1.7. PERTUMBUHAN EKONOMI/PDRB

1.7.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah merupakan gambaran potensi wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi.

Berdasarkan harga berlaku PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada Tahun 2023 PDRB Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan harga konstan PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan, pada Tahun 2024 PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 55.829,71 (dalam milyar) atau menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 53.366,74 (dalam milyar).

Tabel 12.2
Table

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Tengah (miliar rupiah), 2020–2024
Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Lampung Tengah Regency (billion rupiahs), 2020–2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	16.052,16	15.984,70	16.440,66	16.581,69	16.106,65
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2.280,77	2.235,11	2.275,60	2.434,26	2.623,18
C Industri Pengolahan/Manufacturing	10.777,42	11.388,28	11.462,84	11.697,50	12.933,26
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	60,02	62,45	65,33	69,13	69,01
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	17,39	18,56	19,27	19,39	19,04
F Konstruksi/Construction	5.279,47	5.654,56	5.948,53	6.426,16	6.607,26
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4.938,66	5.175,16	6.085,02	6.774,48	7.399,64
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1.273,57	1.305,39	1.598,01	1.886,97	2.099,86
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	463,99	456,58	512,80	585,41	614,94
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	2.051,37	2.182,18	2.203,60	2.393,49	2.610,33
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	747,11	764,90	740,32	770,62	805,21
L Real Estat/Real Estate Activities	909,17	927,39	962,23	971,80	1.037,14
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	48,64	49,58	58,21	61,64	67,31
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	749,60	778,79	769,16	771,04	831,63
P Jasa Pendidikan/Education	1.161,98	1.180,84	1.221,68	1.251,01	1.271,41
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	278,57	288,14	287,52	298,88	320,37
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	258,07	257,44	322,68	373,29	413,47
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	47.347,97	48.710,04	50.973,45	53.366,74	55.829,71

Catatan/Note: *) Angka Revisi/ Revision figures

**) Angka Sementara/ Temporary figures

***) Angka Sangat Sementara/ Very Temporary Numbers

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

1.7.2. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2011 Menurut Lapangan Usaha tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah mencapai sebesar 4,62 persen.

Tabel 12.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Tengah (persen), 2020–2024
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Lampung Tengah Regency (percent), 2020–2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	0,80	-0,42	2,85	0,86	-2,86
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	3,31	-2,00	1,81	6,97	7,76
C Industri Pengolahan/Manufacturing	-4,63	5,67	0,65	2,05	10,56
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	7,93	4,05	4,60	5,82	-0,17
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,60	6,75	3,80	0,63	-1,81
F Konstruksi/Construction	-2,03	7,10	5,20	8,03	2,82
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-3,84	4,79	17,58	11,33	9,23
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-4,21	2,50	22,42	18,08	11,28
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-5,16	-1,60	12,31	14,16	5,05
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	6,24	6,38	0,98	8,62	9,06
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3,72	2,38	-3,21	4,09	4,49

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022*	2023**	2024***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/Real Estate Activities	-3,08	2,00	-3,76	0,99	6,72
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-1,49	1,95	-17,39	5,91	9,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	4,09	3,89	-1,24	0,24	7,86
P	Jasa Pendidikan/Education	4,81	1,62	3,46	2,40	1,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	10,83	3,43	-0,21	3,95	7,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-4,21	-0,25	25,34	15,69	10,76
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-1,02	2,88	4,65	4,70	4,62

Catatan/Note: *) Angka Revisi/ Revision figures

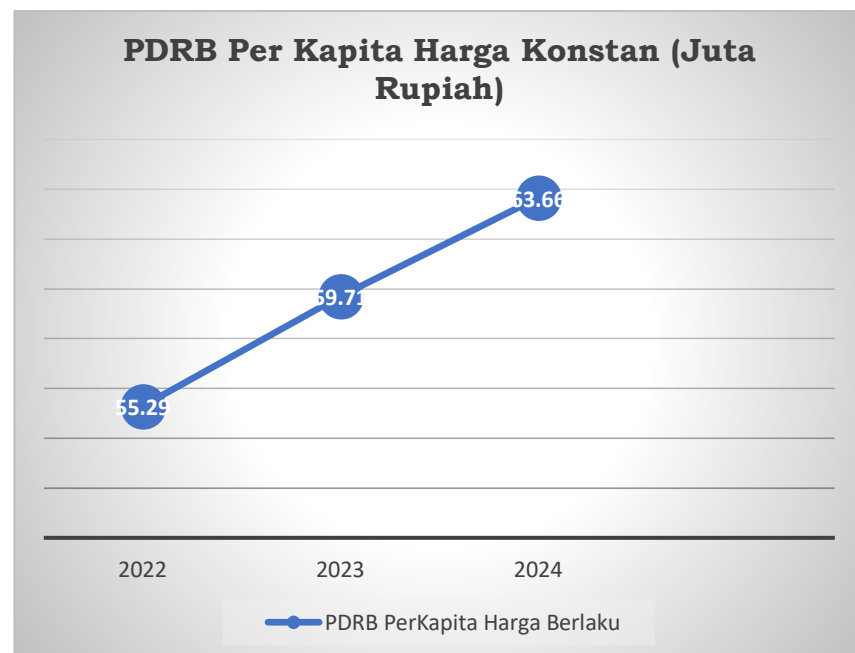
**) Angka Sementara/ Temporary figures

***) Angka Sangat Sementara/ Very Temporary Numbers

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

1.7.3.PDRB Perkapita Harga Berlaku

PDRB Perkapita Harga Berlaku di kabupaten Lampung Tengah dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 selalu mengalami kenaikan



1.8. ISU-ISU STRATEGIS

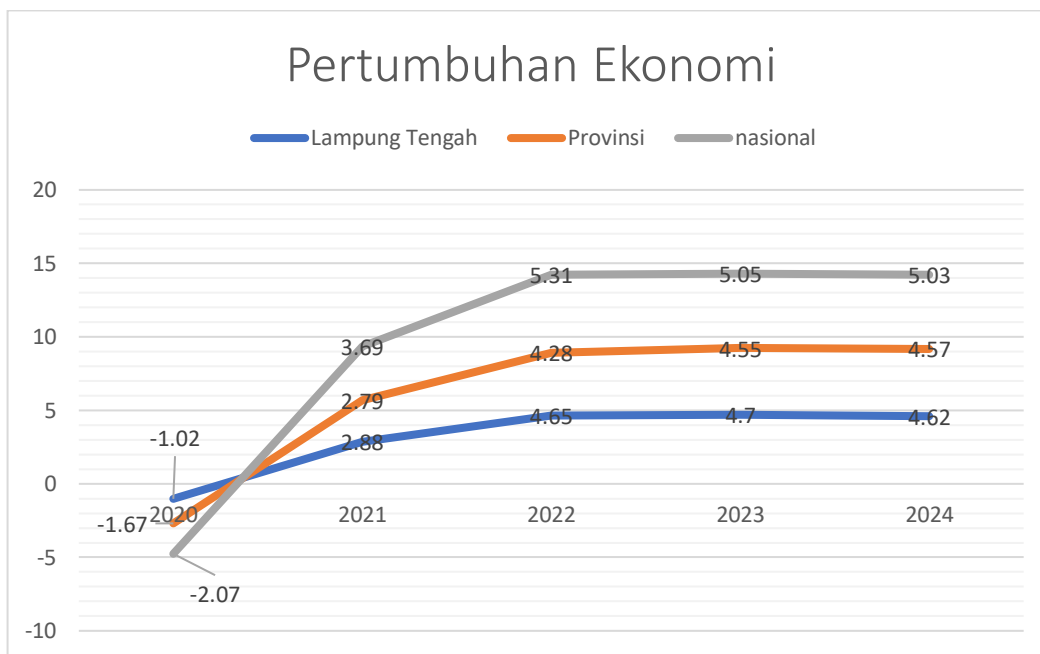
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi baik itu persoalan maupun peluang atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah, sedangkan secara populis, penetapan isu strategis dapat merupakan kesepakatan multipihak dari sekian banyak *stakeholders*.

Berdasarkan penggabungan terhadap kedua pendekatan tersebut, di bawah ini akan diuraikan secara rinci tentang berbagai isu strategis baik dalam skala nasional, Provinsi Lampung maupun Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan Kabupaten Lampung Tengah lima tahun mendatang. Perbandingan dan analisa isu strategis di bawah ini menunjukkan bahwa seluruh isu strategis

yang dihadapi Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Lampung.

1.8.1. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi



Kabupaten Lampung Tengah mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2019 sebesar 5,35 %, diatas pertumbuhan ekonomi propinsi yang sebesar 5,25%, dan berada di atas Nasional (5,17%). Meski dengan capaian yang tinggi, pertumbuhan tersebut stagnan di angka 5% untuk 5 (lima) tahun ke belakang dan bahkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi atau penurunan mencapai (-1,02%) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan terus mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 2,88 dan di tahun 2022 sebesar 4,65 diatas angka Provinsi Lampung sebesar 4,28 tapi masih berada dibawah angka nasional sebesar 5,31. Ditahun 2023 sebesar 4,70 diatas dari Provinsi sebesar 4,55 dan

dibawah dengan Nasional sebesar 5,05. Di Tahun 2024 mengalami penurunan 0,08 menjadi 4,62 tapi nilai ini masih diatas provinsi dengan nilai 4,57 dan dibawah nasional sebesar 5,03.

1.8.2. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Masih tingginya angka kemiskinan penduduk Kabupaten Lampung Tengah jumlahnya mencapai 137,41 ribu jiwa lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Propinsi Lampung yang sebesar 941,23 Ribu Jiwa.

Tabel 13.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (ribu orang), 2020–2024
Number of Poor Population by Regency/Municipality in Lampung Province (thousand people), 2020–2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	38,12	39,36	36,2	34,73	33,43
Tanggamus	70,37	71,89	67,43	65,18	64,22
Lampung Selatan	143,33	145,85	136,21	133,67	132,38
Lampung Timur	153,57	159,79	149,12	148,26	142,69
Lampung Tengah	152,28	155,77	143,34	140,29	137,41
Lampung Utara	119,35	121,91	114,67	107,21	105,91
Way Kanan	58,41	59,89	54,28	51,26	48,88
Tulang Bawang	42,43	44,53	39,19	37,83	37,46
Pesawaran	66,04	68,31	63,17	59,29	55,01
Pringsewu	40,12	41,04	38,18	37,6	34,42
Mesuji	14,72	15,24	13,88	13,71	12,91
Tulang Bawang Barat	20,29	23,03	20,72	20,32	20,35
Pesisir Barat	22,24	23,23	21,85	21,45	20,21
Bandar Lampung	93,74	98,76	90,51	87,08	83,88
Metro	14,31	15,32	13,68	12,8	12,07
Lampung	1.049,32	1.083,93	1.002,41	970,67	941,23

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun

2024 sebesar 3,33 persen berada di posisi 11 terendah angka penganggurannya dibandingkan 15 kabupaten/kota lainnya dan Provinsi Lampung.

1.8.3. Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 terealisasi sebesar 74,16 masih dibawah IPM nasional tahun 2024 sebesar 75,02 meskipun berada diatas capaian provinsi Lampung sebesar 73,13 di tahun yang sama.

Kualitas pembangunan manusia dari sisi kesetaraan gender dapat diketahui dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pencapaian IPG di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan peningkatan dari sebesar 89.94 pada tahun 2021 menjadi 90.11 pada tahun 2022 dan turun di 2023 menjadi 90,02.

1.8.4. Tingginya Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas memuat kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan dan pemalsuan uang. Angka kriminalitas semakin turun dari tahun 2020 sebesar 4,25 kasus menjadi 2,87 kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di tahun 2022 dan di tahun 2024 tidak ada kasus konflik sosial. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi.

1.8.5. Belum Optimalnya Konektivitas Antar Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi pembangunan antar wilayah di Kabupaten Lampung Tengah sampai tahun 2023 belum merata. Dengan luas wilayah wilayah mencapai 4559,57 Km², dan secara administratif terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 301 kampung dan 10 kelurahan, dalam hal bidang pembangunan infrastruktur jalan, dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.119.673 km, ditahun 2024 kondisi jalan mantap 516.234 km atau sebesar 46,11% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 55,67% atau sepanjang 623.300 km.

1.8.6. Belum Optimalnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar

Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang layak, yang ditunjukkan oleh persentase rumah tangga di tahun 2024

Tabel 11. Capaian IKU Tahun 2021-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase jumlah rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh yang ditangani	76,3	11	78,26	47,3	82,61	66,3	86,08	81,3	94,45%
2	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	89,6	89,88	91,6	90,58	93,28	94,65	94,62	94,8	101,5%
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan sanitasi	94,4	98,65	95,44	98,67	96,35	91,7	97,08	94,32	97,15%
4	Persentase wilayah perkotaan yang memiliki saluran drainase yang baik	54,9	20,4	61,86	61,86	69,49	61,86	75,59	69,36	91,76%
5	Persentase penanganan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman berkualitas dan sehat	19	60,9	35	48,28	48	45,16	58,4	66,67	114%
6	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan	26	26	40	40	52	52	61,6	61,6	100%

Sumber: Olahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya, 2025

1.8.7. Belum Optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2024 di Kabupaten Lampung sebesar 62,80 mengalami kenaikan sebesar 2,83 poin dari tahun 2023 sebesar 59,97. Jika ditinjau dari komposit Indek Kualitas Air tahun 2024 di Kabupaten Lampung sebesar 58,64 mengalami kenaikan sebesar 5,31 poin dari tahun 2023 sebesar 53,33, Indeks kualitas lahan tahun 2024 di Kabupaten Lampung sebesar 26,43 mengalami penurunan sebesar 0,32 poin dari tahun 2023 sebesar 26,75, sedangkan indeks kualitas udara tahun 2024 di Kabupaten Lampung sebesar 86,24 mengalami kenaikan sebesar 2,15 poin dari tahun 2023 sebesar 84,09.

1.8.8. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 sudah menunjukkan adanya kemajuan diantaranya penilaian atas Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) masuk dalam kategori sedang dengan nilai sebesar 3,2591 dan diperolehnya opini BPK atas laporan keuangan daerah kategori WTP pada beberapa tahun ini, namun demikian masih ada beberapa penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal seperti pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang masih masih kategori B (66,42), kemudian reformasi birokrasi yang belum dilakukan evaluasi secara optimal, sehingga nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 masih dalam kategori BB (73,48).

Tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara tidak langsung tata kelola pemerintahan yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus didorong dengan penerapan reformasi birokrasi yang merupakan upaya untuk perbaikan kinerja aparatur melalui penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan

Reformasi birokrasi diarahkan pada pencapaian birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi baru mencapai predikat “B” nilai 66,42. Penilaian ini menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, baik pada tingkat kabupaten maupun perangkat daerah. Namun demikian perlu upaya peningkatan agar tidak tertinggal dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun terakhir tahun 2019 sampai tahun 2023 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hasil ini perlu terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah.

1.9. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah selama Tahun 2024. Capaian kinerja tersebut akan dibandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja dimungkinkan dapat diidentifikasinya sejumlah kendala dan permasalahan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut ini.

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas/ ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi Anggaran.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

TAHUN 2024

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH TAHUN 2021 – 2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan sistem serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2030, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2021-2026 sebagai acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2021 – 2026 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka visi pembangunan lima tahun ke depan adalah **”Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**.

Visi Rakyat Lampung Tengah **Berjaya** pada uraian visi pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut:

1. Pendidikan Berjaya

Makna Pendidikan Berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa.

2. Kesehatan Berjaya

Kesehatan Berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.

3. Pemuda Milenial Berjaya

Makna Pemuda Milenial Berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang

4. SIJALU Berjaya

SIJALU merupakan akronim dari *Setiap Infrastruktur Jalan Mulus*. diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan keberlanjutan (*sustainability*). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Petani Berjaya

Petani Berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

6. BUMKAM Berjaya

BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM Berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap Kampung sebagai posos ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

7. Keberagaman Umat Berjaya

Makna Keberagaman Umat Berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

8. Pelayanan Berjaya

Makna Pelayanan Berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan *good governance* bagi masyarakat dan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan visi dan makna 'berjaya' di atas, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).

- 2.Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
- 3.Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
- 4.Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
- 5.Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

2.1.2.Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk pencapaian tujuan dan sasaran selama periode RPJMD (lima tahun), serta memandu dan menjelaskan pelaksanaan strategi selama periode perencanaan yang tertuang dalam Strategi dan Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

I. Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).

Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif.

Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya keadilan dan kesetaraan Gender, prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- ✓ Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda, dan Pramuka;
- ✓ Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga;

- 2) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, meningkatkan kualitas

pengelolaan pendidikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan TI untuk meningkatkan kualitas pendidikan;

- ✓ Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat;
- ✓ Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya;

3) Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat;

4) Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga.

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana dan ketahanan keluarga.

II. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, melalui pembangunan dan rehabilitasi;
- ✓ Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih;

- 2) Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan

- 3) Meningkatnya kualitas jaringan irigasi;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten;

- 4) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat;

Strateginya adalah

- ✓ Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur, pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh, dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru;

✓ Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah;

5) Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Strateginya adalah

✓ Meningkatkan pengelolaan SDA lingkungan hidup sesuai daya dukung daya tampung;

✓ Meningkatkan pengelolaan sampah dengan memperluas area pelayanan sampah, pengolahan sampah di TPA, dan pengurangan sampah (3R);

6) Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan

Strateginya adalah

✓ Meningkatkan koordinasi penataan ruang daerah.

III. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, penguatan kapasitas sumber daya pertanian, serta penanganan bencana pertanian ;
- ✓ Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- ✓ Meningkatkan produktivitas perikanan melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik, pendampingan pemasaran, industri pengolahan perikanan, dan penyediaan sarana produksi perikanan;
- ✓ Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau;
- ✓ Meningkatkan sarana distribusi perdagangan, mempermudah perijinan serta pendaftaran perusahaan perdagangan, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;

- ✓ Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap tenaga kerja local;
- ✓ Meningkatkan kunjungan wisata dan Mengembangkan daerah tujuan wisata unggulan dan destinasi wisata baru, agrowisata dan ekowisata, serta infrastruktur pengembangan pariwisata;

2) Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat;

Strateginya adalah

- ✓ Mendorong perkembangan IKM, UMKM, dan koperasi

3) Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- ✓ Meningkatkan kontribusi BUMD dalam upaya peningkatan PAD melalui pembinaan exsisting BUMD dan atau pendirian BUMD baru;

4) Meningkatnya Iklim Investasi Daerah;

Strateginya adalah

- ✓ Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi, pemasaran investasi dan kemudahan perizinan berusaha di daerah;

5) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMKam, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Kampung, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah Kampung

6) Menurunnya angka pengangguran;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang telah dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- ✓ Meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan/ hubungan industrial;

7) Meningkatnya penanganan kemiskinan.

Strateginya adalah

- ✓ Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

IV. Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas masyarakat. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :

1)Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial;

Strateginya adalah

- ✓ Peningkatan kondusivitas daerah, pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat

2)Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS

3)Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;

V. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; Strateginya adalah
 - ✓ Meningkatkan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - ✓ Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme perencanaan serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
 - ✓ Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan penelitian dan pengembangan dan penyelenggaraan kompetisi iptek;
 - ✓ Meningkatkan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan, evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah ;
 - ✓ Pengembangan e-government untuk menunjang sistem pemerintahan yang terbuka (open

goverment) dan pelayanan publik secara online yang andal, terpercaya serta terjangkau;

- ✓ Meningkatkan keamanan informasi melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM persandian;
- ✓ Peningkatan implementasi *single data* didukung teknologi informasi terintegrasi

2. Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel;

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN);

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Strateginya adalah

- ✓ Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- ✓ Meningkatkan pengelolaan kearsipan melalui dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan;
- ✓ Peningkatan kualitas pelayanan transmigran;
- ✓ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung/kelurahan;

- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD sesuai standar operasional prosedur

2.1.3. Program Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka dilakukan berbagai kebijakan dan program, diantaranya :

1. Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan misi 1 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui program, sebagai berikut :

- **Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan,** yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Program Perlindungan Perempuan;
 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
 5. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha);
 6. Program Perlindungan Khusus Anak;
 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
 9. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

- **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pembinaan Perpustakaan;
 2. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
 3. Program Pengelolaan Pendidikan;
 4. Program Pendidik dan tenaga pendidik;
 5. Program Pengembangan Kebudayaan;
 6. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- **Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- **Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pengendalian Penduduk;
 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan misi 2 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui program, sebagai berikut :

- **Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan,** yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Penyelenggaraan Jalan;
 2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
- **Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten,** yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 2. Program Pengelolaan Perkeretaapian;
- **Meningkatnya kualitas jaringan irigasi,** yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda).
- **Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat,** yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
 4. Program Penataan Bangunan Gedung;

5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
 6. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu).
- **Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
 4. Program Pengendalian Bahan Berba-haya & Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berba-haya & Beracun (Limbah B3);
 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh);
 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

10. Program Pengelolaan Persampahan

- **Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan**, yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
3. Program Penyelesaian ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 3 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui program, sebagai berikut :

- **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan**, yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
9. Program Penyuluhan Pertanian;
10. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
12. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
13. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
14. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
16. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional;
17. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
18. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
19. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
20. Program Pengembangan Ekspor;
21. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
22. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

- **Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
 3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi;
 4. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 6. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM).
- **Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 3. Program Pemasaran Pariwisata;
 4. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
- **Meningkatnya Iklim Investasi Daerah, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Program Promosi Penanaman Modal;
 3. Program Pelayanan Penanaman Modal;

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- **Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Penataan Desa;
 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
 - **Menurunnya angka pengangguran**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Program Hubungan Industrial.
 - **Meningkatnya penanganan kemiskinan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pemberdayaan Sosial;
 2. Program Rehabilitasi Sosial;
 3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
 4. Program Penanganan Bencana.
- 4. Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 4 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui program, sebagai berikut :

- **Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
3. Program pembendayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

- **Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

- **Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Penanggulangan Bencana;

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

5. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 5 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui program, sebagai berikut :

- **Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 4. Program Perum Daerahusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
 5. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
 6. Program Aplikasi Informatika;
 7. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 8. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
 9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 10. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 12. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
 13. Program Perekonomian Dan Pembangunan;

14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- **Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
7. Program Pengelolaan Arsip;
8. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
9. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Bupati Lampung Tengah telah menetapkan dokumen

penetapan kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target yang akan dicapai pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

MISI I : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif, meliputi :

1. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan dengan indikator sasaran :
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,08;
 - Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis) 25%.
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah, dengan indikator sasaran :
 - Rata-rata lama sekolah (MYS) 9,55 Tahun;
 - Lama harapan sekolah (EYS) 13,04 Tahun;
 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 44,58 Indeks.
3. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan dengan indikator sasaran:
 - Usia harapan hidup 74,17 Tahun;
 - Prevalensi intervensi stunting 7,6 persen.
4. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga dengan indikator sasaran:
 - Laju pertumbuhan penduduk 1,5 persen.

- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 60 Indeks

MISI II: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, meliputi :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan, dengan indikator sasaran :
 - Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten 59,62 persen;
 - Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten 89,45 persen.
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten, dengan indikator sasaran:
 - Rasio konektivitas Kabupaten/Kota 85 persen
 - Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota 0,6 v/c.
3. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi, dengan indikator sasaran :
 - Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2 sebesar 60 persen
4. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah luas kawasan kumuh 7 ha
 - Rumah tidak layak huni 5,5 persen
 - Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman 94,35 persen
 - Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman 96,35 persen

5. Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran :
 - Indeks kualitas lingkungan air 58,64 IKA
 - Indeks kualitas udara 84,28 IKU
 - Indeks kualitas lahan 31,47 ITL
6. Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan, dengan indikator sasaran :
 - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang 82 persen

MISI III: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu, meliputi:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, dengan indikator sasaran :
 - Score PPH 88,2 Nilai
 - Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB 37 persen
 - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 12 persen
 - Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB 23,7 persen
2. Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat, dengan indikator sasaran

- Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi 11 persen
- 3. Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator sasaran :
 - Rasio Kemandirian Fiskal 8,4 persen
- 4. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah, dengan indikator sasaran :
 - Persentase peningkatan investasi 31 persen
- 5. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung, dengan indikator sasaran :
 - Indeks Desa Membangun 0,756 indeks
- 6. Menurunnya angka pengangguran, dengan indikator sasaran:
 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 74,33 persen
- 7. Meningkatnya penanganan kemiskinan, dengan indikator sasaran :
 - Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil satu 16 persen

MISI IV: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat, meliputi :

1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah kejadian Konflik Sosial 0 kejadian

2. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda 10 persen
3. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, dengan indikator sasaran :
 - Indeks Resiko Bencana kategori sedang

MISI V: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas, meliputi :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran:
 - Opini BPK atas laporan keuangan WTP predikat
 - Indeks SPBE 2,5 indeks
 - Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah B Nilai
 - Indek Inovasi Daerah 1,785 indeks/predikat inovatif
2. Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel, dengan indikator sasaran:
 - Indeks Profesionalitas ASN 62 indeks
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran:
 - Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik 88,81 persen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah partisipatif yang diambil. Termasuk pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya.

3.1. CAPAIAN KINERJA

3.1.1 Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Misi I

Pada Misi I terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja, dengan didukung oleh 22 program, dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran pertama dikembangkan melalui 8 (delapan) program;
- Sasaran kedua dikembangkan melalui 7 (tujuh) program;
- Sasaran ketiga dikembangkan melalui 4 (empat) program;
- Sasaran keempat dikembangkan melalui 3 (tiga) program.

Realisasi kinerja misi 1 dapat terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi I Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,08	90,02	98,84
		Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	Persen	25	6,06	24,24
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	44,58	48,29	108,32
		Rata-rata lama sekolah (MYS)	Tahun	9,55	7,97	83,46
		Lama harapan sekolah (EYS)	Tahun	13,04	13,17	100,99
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	Tahun	74,17	74,38	100,28
		Prevalensi intervensi stunting	Persen	7,6	7,6*	100
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,5	1,11	74
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60	62,16	103,6

Keterangan * = Data Sementara SSGI 2023

2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi II

Pada Misi II terdapat 6 (enam) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja, dengan didukung oleh 24 program, dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran pertama dikembangkan melalui 2 (dua) program;
- Sasaran kedua dikembangkan melalui 2 (dua) program;

- Sasaran ketiga dikembangkan melalui 1 (satu) program;
- Sasaran keempat dikembangkan melalui 8 (delapan) program;
- Sasaran kelima dikembangkan melalui 8 (delapan) program;
- Sasaran keenam dikembangkan melalui 3 (tiga) program

Realisasi kinerja misi II dapat terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi II Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	59,62	46,11	77,34
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Persen	89,45	89,45	100
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	Persen	85	72	84,71
		Kinerja lalu Lintas Kabupaten/ Kota	v/c	0,6	0,26	156,67
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2	Persen	60	57,41	95,68
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	ha	7	6,86	102,00
		Rumah tidak layak huni	Persen	5,5	4,66	115,27
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	Persen	94,35	94,8	100,48

		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	Persen	96,35	94,32	97,89
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	IKA	58,64	58,89	100,43
		Indeks kualitas udara	IKU	84,28	86,24	102,33
		Indeks kualitas lahan	ITL	31,47	26,43	83,98
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang	Persen	82	77	93,90

3. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi III

Pada Misi III terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, dengan didukung oleh 48 program, dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran pertama dikembangkan melalui 22 (dua puluh dua) program;
- Sasaran kedua dikembangkan melalui 4 (empat) program;
- Sasaran ketiga dikembangkan melalui 4 (empat) program;
- Sasaran keempat dikembangkan melalui 5 (lima) program;
- Sasaran kelima dikembangkan melalui 4 (empat) program;
- Sasaran keenam dikembangkan melalui 3 (tiga) program;
- Sasaran ketujuh dikembangkan melalui 4 (empat) program;

Realisasi kinerja misi III dapat terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi III Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	Nilai	88,2	93,7	106,24
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	Persen	37	31,57	85,32
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	12	13,05	108,75
		Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	Persen	23,7	22,99	97
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	Persen	11	10,27	93,36
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	8,4	8,92	106,19
4	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	Persen	31	30,42	98,13
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,756	0,749	99,07
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,33	73,51	98,89
7	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	16	18,83	117,69

4. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi IV

Pada Misi IV terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan didukung oleh 9 program, dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran pertama dikembangkan melalui 5 (lima) program;
- Sasaran kedua dikembangkan melalui 2 (dua) program;
- Sasaran ketiga dikembangkan melalui 2 (dua) program;

Realisasi kinerja misi IV dapat terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.4

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi IV Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	100
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	persen	10	10	100
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Kategori	Sedang	Sedang	100%

5. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi V

Pada Misi V terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja, dengan didukung oleh 22 program, dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran pertama dikembangkan melalui 14 (empat belas) program;

- Sasaran kedua dikembangkan melalui 2 (dua) program;
 - Sasaran ketiga dikembangkan melalui 6 (enam) program
- Realisasi kinerja misi IV dapat terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.5

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi V Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	predikat	WTP	WTP*	100
		Indeks SPBE	Indek	2,15	2,68	107,2
		Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	predikat	B	B	100
		Indek Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	100
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indek	62	74,89	120,79
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persen	88,81	86,36	97,24

Catatan: * Data Sementara

3.1.2 Pengukuran Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perkembangan capaian sasaran tahun 2024 terhadap capaian sasaran tahun 2023 dan 2022, maka dilakukan perbandingan realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022. Berikut disajikan dalam tabel rekapitulasi

perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022.

Tabel 3.6
Rekapitulasi Perbandingan Kinerja Misi I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,68	89,94	99,18	91,08	90,11	98,93	91,08	90,02	98,84
		Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	21,43	59,38	277,09	25	3,22	12,88	25	6,06	24,24
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	9,69	74,54	14	44,58	318,43	44,58	48,29	108,32
		Rata-rata lama sekolah (MYS)	9,5	7,64	80,42	9,55	7,81	81,78	9,55	7,97	83,46
		Lama harapan sekolah (EYS)	12,3	12,95	105,28	12,32	13,04	105,84	13,04	13,17	100,99
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	70,04	70,08	100,06	70,14	74,17	105,75	74,17	74,38	100,28
		Prevalensi intervensi stunting	12,06	8,7	127,86	11,42	7,6	133,45	7,6	7,6	100
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	1,5	1,55	103,33	1,5	1,15	76,67	1,5	1,1	74
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	54,38	53,37	98,14	60	59,38	98,97	60	62,16	103,6
Rata-Rata Capaian Kinerja					111,03			114,74			88,27

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi I dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi Penurunan dari 2023 ke 2024, tapi secara rata-rata capaian kinerja pada Misi I dalam kategori baik.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	65,5	58,86	89,86	67,5	64,99	96,28	59,62	46,11	77,34
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	89,36	89,36	100	90,36	90,36	100	89,45	89,45	100
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	85	64	75,29	85	64	75,29	85	72	84,71
		Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,6	0,23	161,67	0,6	0,23	161,67	0,6	0,26	156,67
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2	95,5	72,6	76,02	96,74	57,41	59,34	60	57,41	95,68
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	8	7,01	129,50	7	6,9	101,43	7	6,86	102,00
		Rumah tidak layak huni	6	5,5	108,33	5,5	5,47	100,55	5,5	4,66	115,27
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	91,6	90,58	98,89	93,28	94,65	101,47	94,35	94,8	100,48
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	95,44	98,67	103,38	96,35	91,7	95,17	96,35	94,32	97,89
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	58,44	50	85,56	58,54	53,33	91,10	58,64	58,89	100,43
		Indeks kualitas udara	84,08	82,55	98,18	84,18	84,09	99,89	84,28	86,24	102,33
		Indeks kualitas lahan	29,17	24,64	84,47	31,47	26,75	85	31,47	26,43	83,98
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang	80	70	87,5	82	75	91,46	82	77	93,90
Rata-Rata Capaian Kinerja					106,65			96,82			100,82

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi II dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi kenaikan di tahun 2022 dan penurunan di tahun 2023, tapi walaupun mengalami penurunan

pada rata-rata capaiannya namun masih dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.8

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	86,7	86,19	99,41	87,2	88,2	101,15	88,2	93,7	106,24
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	36,8	34	92,39	37	33,36	90,16	37	31,57	85,32
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11	12	109,09	11,5	12,52	108,87	12	13,05	108,75
		Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	23,3	22	94,42	23,7	21,65	91,35	23,7	22,99	97,00
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	40	41,69	104,23	40	4,98	12,45	11	10,27	93,36
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	7,54	11,20	148,54	8	9,03	112,88	8,4	8,92	106,19
4	Meningkatnya iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	85	82,63	97,21	85	17	20	31	30,42	98,13
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	0,735	0,7231	98,38	0,756	0,735	97,22	0,756	0,749	99,07
6	Menurunkan angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,90	73,71	99,74	74,33	73,32	98,64	74,33	73,51	98,89
7	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	4	4,16	104	4	15,29	382,25	15	16	117,69
Rata-Rata Capaian Kinerja					90,51			111,497			101,064

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi III dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi Penurunan dari 2023 ke 2024, tapi secara rata-rata capaian kinerja pada Misi I dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.9

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	1	1	100	0	0	100	0	0	100
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	10	10	100	10	10	100	10	10	100
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Sedang	Sedang	100	Sedang	Sedang	100	Sedang	Sedang	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100			100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi IV dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi IV dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.10

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi V

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
		Indeks SPBE	2,1	2,1	100	2,15	2,68	124,65	2,5	2,68	107,2
		Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	B	B	100	B	B	100	B	B	100
		Indek Inovasi Daerah	INOVATIF	INOVATIF	100	INOVATIF	INOVATIF	100	INOVATIF	INOVATIF	100
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	30	28,74	95,8	58	61,79	106,53	62	74,89	120,79
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	86,72	85,64	98,75	88,81	86,33	97,21	88,81	86,36	97,24
Rata-Rata Capaian Kinerja					94,42			104,73			

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi V dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi V dalam kategori sangat baik.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Penjabaran perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah diakhir tahun RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RPJMD	REALISASI PK	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI I						
Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat						
1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,49	90,02	98,39
		Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	Persen	28,57	6,06	21,21
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Rata-rata lama sekolah (MYS)	Tahun	9,6	7,97	83,02
		Lama harapan sekolah (EYS)	Tahun	12,34	13,17	106,73
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15	48,29	321,93
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	Tahun	70,24	74,38	105,89
		Prevalensi intervensi stunting	Persen	10,78	7,6	129,50
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,51	1,1	215,69
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64	62,16	97,13

MISI II Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa						
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	69,5	46,11	66,35
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Persen	91,36	89,45	97,91
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	Persen	86	72	83,72
		Kinerja lalu Lintas Kabupaten/ Kota	v/c	0,62	0,26	158,06
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase luas areal sawah irigasi dengan IP>2	Persen	97,97	57,41	58,59
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	ha	26,17	6,86	173,79
		Rumah tidak layak huni	Persen	13,92	4,66	166,52
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	Persen	94,62	94,8	100,19
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	Persen	97,08	94,32	97,16
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	IKA	58,64	58,89	100,43
		Indeks kualitas udara	IKU	84,28	86,24	102,33
		Indeks kualitas lahan	ITL	33,78	26,43	78,24
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Tata Ruang	Persen	84	77	91,67
MISI III Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan						
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	Nilai	88	93,7	106,48
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	Persen	37,3	31,57	85,32

		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	12	13,05	108,75
		Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	Persen	24	22,99	95,79
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	Persen	20	10,27	51,35
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	8,4	8,92	106,19
4	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	Persen	10	30,42	304,2
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7768	0,749	96,42
6	Menurunya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,75	73,51	98,89
7	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	4	18,83	470,75
MISI IV Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah						
1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	100
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	persen	10	10	100
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	kategori	Sedang	Sedang	100

MISI V Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	100
		Indeks SPBE	indek	2,2	2,68	121,82
		Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	predikat	A	B	50
		Indek Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	100
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indek	59	74,89	126,93
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persen	89,47	86,36	96,52

Dari 43 indikator kinerja terdapat beberapa perubahan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, hal ini disebabkan karena target yang ada pada RPJMD sudah tidak relevan lagi: seperti indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, jumlah kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, persentase peningkatan volume usaha koperasi dan persentase peningkatan investasi.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja di Kabupaten Lampung Tengah, maka diperlukan adanya perbandingan dengan standar nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI PK	STANDAR NASIONAL	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI I						
Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat						
1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,02	(Min : 0) (Max : 100)	BPS
		Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	Persen	6,06	Tidak ada	
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Rata-rata lama sekolah (MYS)	Tahun	7,97	(Min : 0 Thn) (Max : 15Thn)	BPS
		Lama harapan sekolah (EYS)	Tahun	13,17	(Min : 0 Thn) (Max : 18Thn)	BPS
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	48,29	75,1-100 tinggi 50,1-75 sedang 25,1-50 rendah 0-25 sangat rendah	Peraturan Perpustakaan Nasiona RI No 7 Tahun 2020 tentang Renstra Perpustakaan Nasional 2020-2024
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	Tahun	74,38	(Min :20 Thn) (Max :85Thn)	BPS
		Prevalensi intervensi stunting	Persen	7,6	14	Kemenkes
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,11	0,98	BPS
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62,16	57	RPJMN KEMENKO PMK 2020-2024
MISI II						
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa						
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	46,11	79	Target Mantap Jalan Provinsi Lampung Tahun 2024
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Persen	89,45	Tidak ada	
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	Persen	72	Tidak ada	
		Kinerja lalu Lintas Kabupaten/ Kota	v/c	0,26	Tidak ada	
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	Persen	57,41	Tidak ada	

4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	Ha	6,86	Tidak ada	
		Rumah tidak layak huni	Persen	4,66	Tidak ada	
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	Persen	94,8	Tidak ada	
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	Persen	94,32	Tidak ada	
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	IKA	58,89	55,20	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks kualitas udara	IKU	86,24	87,3	
		Indeks kualitas lahan	ITL	26,43	73,4	
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang	Persen	77	Tidak ada	
MISI III Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan						
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	Nilai	93,7	91,6	RPJMN 2020-2024 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	Persen	31,57	Tidak ada	
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,05	Tidak ada	
		Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	Persen	22,99	Tidak ada	
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	Persen	10,27	Tidak ada	
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	8,92	Tidak ada	
4	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	Persen	30,42	Tidak ada	

5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,749	Desa Mandiri: > 0,8155 Desa Maju: ≤0,8155 dan >0,7072 Desa Tertinggal: ≤0,5989 dan >0,4907 Desa Sangat Tertinggal: ≤0,4907	Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,51	70,41	Data TPAK Provinsi Lampung Tahun 2024
7	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	18,83	Tidak ada	

MISI IV
Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah

1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	Tidak ada	
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	persen	10	Tidak ada	
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	kategori	sedang	Tidak ada	

MISI V
Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	predikat	WTP	1. WTP 2. WDP 3. Opini Tidak Wajar 4. TMP	UU No.15 Th.2004
		Indeks SPBE	indek	2,68	1. 4,2 - 5,0 2. 3,5 - <4,2 3. 2,6 - <3,5 4. 1,8 - <2,6 5. <1,8	PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018
		Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	predikat	B	1. >0-30 sangat kurang 2. >30-50 kurang 3. >50-60 cukup 4. >60-70 baik 5. >70-80 sangat baik 6. >80-90 Memuaskan 7. >90-100	PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

		Indek Inovasi Daerah	Predikat	inovatif	sangat memuaskan 1. Sangat Inovatif 2. Inovatif 3. Kurang Inovatif 4. Tidak Dapat Dinilai	Kepmendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indek	74,89	1. 91-100 2. 81-90 3. 71-80 4. 61-70 5. 60 ke bawah	Peraturan BKN RI Nomor 8 Tahun 2019
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persen	86,36	1. 25-43,75 D 2. 43-76-62,50 C 3. 62,51-81,25 B 4. 81,26-100 A	PermenPANRB no 14 Tahun 2017

1. Pada Misi 1 dari 9 indikator, terdapat 8 indikator yang mempunyai standar nasional, yaitu:

- ✓ Indeks pembangunan gender di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 90,02 mendekati nilai maksimal yang ditetapkan oleh BPS sebesar 100, hal ini menunjukkan semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.
- ✓ Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2024 sebesar 44,58 berada pada kategori rendah, terjadi peningkatan dari tahun 2023 sebesar 3,71 berada pada kategori rendah.
- ✓ Rata-rata lama sekolah (MYS) sebesar 7,97 tahun berada di tengah nilai maksimal yang ditetapkan oleh BPS sebesar 15 tahun, hal ini menunjukkan secara rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang berusia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 7,97 tahun.

- ✓ Lama harapan sekolah (EYS) sebesar 13,17 tahun berada di bawah nilai maksimal yang ditetapkan oleh BPS sebesar 18 tahun, hal ini menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,17 tahun atau setara dengan Diploma I.
- ✓ Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 74,38 tahun, masih dibawah nilai maksimal yang ditetapkan oleh BPS sebesar 85 tahun, tetapi nilai UHH pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,21 tahun dari tahun 2023 sebesar 74,17 tahun.
- ✓ Prevelensi intervensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 7,6% berada di atas dari standar nasional sebesar 14%, hal ini tidak lepas dari keberhasilan program-program penanggulangan stunting yang telah dilakukan diantaranya adalah pemberian makanan tambahan (PMT) pada Balita dan ibu Hamil; pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil; peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita; pemberian vitamin A.
- ✓ Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebesar 1,11 berada diatas dari standar nasional 0,98, tapi angka tersebut sudah lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,15. Laju pertumbuhan penduduk dapat disebabkan oleh dua hal pertama karena tingginya angka kelahiran dan

kedua karena tingginya angka migrasi bersih (migrasi masuk dikurangi migrasi keluar).

- ✓ Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2024 sebesar 62,16 angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RPJMN RPJMN KEMENKO PMK 2020-2024 sebesar 57.

2. Pada Misi 2 dari 13 indikator, terdapat 3 indikator yang mempunyai standar nasional, yaitu Indeks kualitas lingkungan air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks kualitas lahan (ITL). Terjadi perbaikan dalam sistem pembuangan seperti mandi dan cuci dari kegiatan rumah tangga, dan berkurangnya pencemaran air, Selain itu keberhasilan pencapaian indikator ini juga dapat dilihat dari Persentase penanganan sampah, Persentase penduduk berakses air minum, Persentase luas pemukiman yang tertata, Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, Penegakan hukum lingkungan, Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih, Jumlah hari dengan Kualitas Udara Kategori Baik. Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah.

3. Pada misi 3 dari 10 indikator terdapat 3 indikator yang mempunyai standar nasional yaitu score PPH, indeks desa membangun dan tingkat partisipasi Angkatan kerja

- Score PPH dengan realiasi di tahun 2024 sebesar 93,7 jika dibandingkan dengan target RPJMN 2020-2024 Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian sebesar 91,6

maka masih berada dibawah target RPJMN. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan, semakin tinggi skor PPH maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 mencapai 73,51, lebih tinggi dibandingkan Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung sebesar 70,41.
- Indeks Desa Membangun Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 mencapai 0,749 masuk dalam kategori status Maju. Hal ini sesuai dengan kategori status yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu:

Rentang Skor Pengukuran Status Desa dalam IDM dari 0,27–0,92	
Desa Sangat Tertinggal	< 0,491
Desa Tertinggal	> 0,491 dan < 0,599
Desa Berkembang	> 0,599 dan < 0,707
Desa Maju	> 0,707 dan < 0,815
Desa Mandiri	> 0,815

Berikut ini rincian dari status desa di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2018 dan 2024.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MANDIRI	0	0	0	3	16	30	48
MAJU	23	54	83	121	147	168	189
BERKEMBANG	177	221	207	174	138	103	64
TERTINGGAL	100	26	11	3	0	0	0
SANGAT TERTINGGAL	1	0	0	0	0	0	0

4. Pada Misi 4 indikator jumlah kejadian Konflik Sosial dan Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda, belum ada untuk standar nasionalnya, tapi jika dilihat dari capaian kinerja dari indikator tersebut, dapat disimpulkan telah terbentuk kondisi kerukunan di masyarakat, tidak ada konflik serta ketaatan pada aturan daerah. Untuk indikator indeks Resiko Bencana, dari BNPB tidak mengeluarkan standar nasional untuk indeks resiko bencana (IRB), BNPB membagi 3 (tiga) kategori IRB yaitu IRB kategori tinggi, IRB kategori sedang dan IRB kategori rendah, Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori sedang, IRB ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran capaian program penanggulangan bencana yang sudah dilakukan di Kabupaten.
5. Pada misi 5, semua indikator mempunyai standar nasionalnya.
- Opini BPK atas laporan keuangan pada tahun 2024 mendapatkan predikat WTP, hal ini merupakan predikat tertinggi sesuai dengan standar nasional, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- Indeks SPBE Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 berada pada indeks 2,68 masuk dalam predikat baik. Hal ini sesuai dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Predikat Indeks SPBE dibagi menjadi 5, yaitu:

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hal ini menunjukkan bahwa telah ada peningkatan yang signifikan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik sebagai koordinator pelaksana SPBE di Kabupaten Lampung Tengah.

- Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan predikat baik dengan nilai 66,42. Hal ini menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP di Kabupaten Lampung Tengah sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
- Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan predikat inovatif, hal ini sesuai dengan Kepmendagri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang

Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024 terdapat 4 kategori untuk indeks inovasi daerah, yaitu sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai.

- Indeks Profesional ASN, di tahun 2024 sebesar 74,89 masih dalam kategori sedang, hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN terdapat 5 kategori tingkat profesional ASN, yaitu 91-100 sangat tinggi, 81-90 tinggi, 71-80 sedang, 61-70 rendah, 60 ke bawah masuk dalam kategori sangat rendah. Dengan Indeks Profesional ASN Kabupaten Lampung Tengah mengalami kenaikan dari kategori rendah menjadi kategori sedang, namun hal ini masih harus ditingkatkan lagi. Hal-hal yang mempengaruhi diantaranya kompetensi yang masih kurang, budaya kerja yang masih lemah dalam pengawasan, hingga kebijakan sanksi yang diberikan belum memberi efek jera, Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk lebih serius menata ASN, dengan menggunakan sistem merit, serta mulai membenahi dari mulai proses penerimaan PNS sampai dengan pelatihan, guna meningkatkan kompetensi ASN.
- Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebesar 86,36 dengan kategori sangat baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 4 mutu pelayanan, yaitu 25-43,75 D (tidak baik), 43,76-62,50 C (kurang baik), 62,51-81,25 B (Baik), 81,26-100 A (sangat baik).

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

1. Pada Misi I rata-rata capaian sebesar 88,27% terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja, jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada misi I dalam kategori baik.

✓ **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** dengan realisasi 90,02%, keberhasilan indeks IPG ini karena didukung oleh 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan; advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, Hukum, sosial, dan Ekonomi kegiatan ini termasuk dalam keberhasilan dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kegiatan ini dilakukan di kecamatan seputih agung kegiatan ini melibatkan perempuan perempuan kepala keluarga (PEKKA) kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan pelatihan kewirausahaan sehingga dapat memberikan

keterampilan bagi perempuan yang ada di kecamatan tersebut

2. Program Perlindungan Perempuan;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah melakukan Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota Melalui Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Upaya menuju perbaikan kesehatan pekerja/buruh perempuan untuk peningkatan produktivitas kerja dan kualitas generasi penerus di Aula Corporate Affairs Division Lampung.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang berupa Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) yang berlokasi di Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban yaitu berupa Kader PATBM, Kader PKK, Relawan SAPA, Forum Anak Kampung, Kader Posyandu, BKB dan BKR. Kegiatan ini mendapatkan Juara pelaksana terbaik DESA SIGER

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Melaksanakan Kegiatan Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak/Desa

SIGER Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha);

Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan beberapa kegiatan seperti penilaian KLA Puspaga dan Forum Anak Daerah, Penilaian KLA pada Tahun 2024 Mendapatkan penghargaan Madya

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Melakukan Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media, dan Dunia Usaha dalam rangka Evaluasi Program Kerja Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI).

5. Program Perlindungan Khusus Anak;

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak kegiatan ini dukakukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kejahatan fisik dan seksual yang ada di kabupaten lampung Tengah, Kegiatan ini dilakukan dengan Cara melakukan penjangkauan dan pendampingan Kasus Korban kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dari Indikator IPG, didukung oleh beberapa prestasi yang diperoleh, yaitu:

1. Kabupaten Layak Anak Kategori MADYA Penghargaan diberikan oleh kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkat kinerja Kabupaten Lampung Tengah atas keberhasilan dalam Pemenuhan Hak anak Tahun 2024.
 2. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2024 Kategori Madya yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Penghargaan Pelaksanaan Terbaik I DESA SIGER (Bebas Stunting Peduli Anak Ramah Perempuan) Kategori Konvergensi Penanganan Dan Pencegahan Stunting
- ✓ **Presentase cabang Olahraga yang berprestasi pada event nasional** dengan realisasi 6,06 %. Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) program, yaitu Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Dari 49 cabang olahraga yang dipertandingkan, terdapat 2 jenis cabang olahraga yaitu cabang olahraga Hapkido yang berhasil meraih medali perak (1 medali) dan medali perunggu (8 medali) pada event PON XXI 2024.



Untuk meningkatkan keberhasilan dari indikator ini, maka beberapa upaya yang telah dilakukan di Tahun 2024, yaitu:

1. Pembinaan dan pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten;
2. Pemberian penghargaan olahraga Kabupaten dengan melakukan kegiatan memberikan tali asih kepada Atlet – Atlet Berprestasi Kabupaten Lampung Tengah periode Desember 2024 dengan jumlah Atlet sebanyak 20 Orang;

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Keolahragaan berupa Pembangunan Kolam Renang di area Lampung Tengah Sport Centre ;
 4. Pengembangan Organisasi Keolahragaan dengan memberikan dana Hibah ke beberapa cabang olahraga;
- ✓ **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** di tahun 2024 dengan realisasi 48,29%. Realisasi ini memang menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,71, tapi angka ini juga masih masuk dalam kategori rendah. Dengan realiasi 48,29% menunjukkan masih rendahnya minat baca di Kabupaten Lampung Tengah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
- a. Tidak dimulai dari rumah
- Rumah merupakan tempat yang membentuk segala kebiasaan kita. Tak ada aktivitas membaca di rumah, maka tidak ada pembiasaan untuk membaca. Apalagi, sekali baca, anak membaca buku pelajaran sekolah, yang justru membuatnya bosan karena di sekolah belajar, di rumah juga belajar.
- Ada baiknya jika di rumah disiapkan buku-buku fiksi seperti novel, cerpen, sejarah, supaya anak terpancing untuk membaca dengan serius. Karena untuk membaca tidak harus melulu buku non-fiksi seperti kebanyakan buku di sekolah

b. Akibat teknologi

Teknologi berperan besar bagi fenomena rendahnya literasi saat ini. Jangankan untuk literasi, teknologi membuat orang lupa akan waktu dan kegiatan yang seharusnya ia lakukan. Padahal, keberadaan teknologi belum tentu bermaksud untuk mengebiri budaya literasi yang ada, dan melupakan waktu begitu saja.

Dengan adanya teknologi, kita bisa lebih mudah mengakses berbagai macam literasi. Waktu pun juga sama seperti itu, anda bisa menyalakan alarm untuk mengingat waktu kapan anda harus berhenti dan terbangun dari tidur. Pengaruh teknologi, dan hiburan-hiburan yang ada di dalamnya yang membuat orang malas membaca. Sepereti game, social media, dan aplikasi lainnya.

c. Game online dan social media

Inti dari teknologi sebenarnya adalah ini, game online dan social media. Kedua hal itulah berperan aktif menggugurkan minat baca pada anak. Kita bisa lihat game online, kini setiap anak yang mempunyai gadget, pasti ada game online di dalamnya. Mereka akan lebih senang menggunakan uangnya untuk membeli paket internet ketimbang sebuah buku. Social media. Keberadaan sosial media cukup membagi sedikit literasi. Tetapi kebanyakan yang muncul dari sana biasanya tulisan-tulisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak

memiliki sumber yang otentik. Selain itu, di social media anak hanya dapat membaca postingan orang lain yang tidak berguna. Hal tersebut tentu menjauhkan anak dari budaya literasi.

d. Keterbatasan sarana membaca

Keterbatasan sarana ternyata juga jadi penyebab kebiasaan membaca ini tidak dilakukan. Sarana tersebut misalnya perpustakaan. Berapa banyak perpustakaan di daerah anda? Pasti masih bisa terhitung dalam jangkauan kecamatan. Sedangkan jumlah warnet, sukar terhitung bahkan dalam lingkup kecamatan.

Selain itu, koleksi buku di dalam perpustakaan juga berpengaruh. Percuma juga apabila banyak perpustakaan namun isinya buku-buku yang sama dengan sekolah. Maka, anak tidak minat untuk berkunjung ke sana.

e. Tidak menggunakan buku sebagai hiburan

Ada apa dengan membaca? Apakah sebegitu memalaskan sampai ia pun dijauhkan? Mereka anak-anak yang tidak suka membaca, bisa disebabkan karena tidak menggunakan buku sebagai hiburan. Terus terang saja, di sekolah terutama perpustakaan, kebanyakan hanya tersedia buku paket pelajaran. Yang sudah jelas membuat anak kehilangan hiburannya.

Anak akan lebih suka membuka gadget dan akhirnya gadget tersebut dibawa ke sekolah. Mereka

tidak mengenal apa itu buku cerpen, novel, sejarah, yang ketiganya dapat menghibur siswa dari kejenuhan membaca buku paket.

f. Kurang motivasi

Motivasi sangat penting bagi pengembangan diri setiap orang, terutama anak. Bagi orangtua dan guru mestinya mampu memotivasi anak-anaknya agar mendapat semangat untuk membaca. Terkadang, anak tidak tahu banyaknya manfaat ketika ia membaca buku. Akibatnya, anak menjadi malas untuk membaca.

g. Tidak tahu manfaat membaca

Sebenarnya banyak sekali manfaat membaca buku, tergantung pula apa yang dibaca. Seperti misalnya mengetahui sejarah, dan mengasah pikiran logikanya. Sejak kecil, anak perlu diberi tahu manfaat buku dan diberikan media membaca.

Selain itu, dengan membaca anak bisa mendapat wawasan yang luas, mengasah imajinasi dan kemampuan untuk berkarya. Maka dari itu, berilah motivasi yang baik agar anak menjadi semangat dalam membaca buku.

h. Tidak dilanjutkan menulis

Jangan berhenti di membaca saja, jika sudah punya inspirasi, silahkan menulis. Literasi bukan hanya membaca saja, namun juga menulis. Jika banyak yang membaca dan menulis, maka kita akan mengalami peningkatan literasi.

Dari beberapa penyebab tersebut, maka untuk meningkatkan indeks literasi Kabupaten Lampung Tengah, melakukan inovasi-inovasi, seperti:

- pengadaan bahan pustaka tahun 2024, ada penambahan buku sebanyak 63 judul, 907 eksemplar. Dengan adanya penambahan bahan pustaka diharapkan kebutuhan pengunjung yang hendak meminjam buku mempunyai banyak pilihan serta terpenuhinya kebutuhan buku yang mereka perlukan. Adanya discovering buku perpustakaan, banyak buku yang rusak kembali dengan keadaan baik.
- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan perpustakaan Elektronik Ditahun 2024 jumlah anggota perpustakaan yang terdata secara elektronik sebanyak 5880 anggota
- Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah mengikuti Pameran Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2024 di halaman Gedung Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Lampung
 - Melaksanakan kegiatan Study tiru ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Klaten, Yogyakarta

- Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Bidang perpustakaan melakukan pembinaan dan monitoring ke 126 perpustakaan kampung
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang pengelola perpustakaan kampung untuk melakukan bimbingan teknis (Replikasi Mandiri) sebanyak 28 pengelola perpustakaan Kecamatan, 50 Pengelola Perpustakaan Kampung dan 50 Pengelola Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dengan narasumber kami hadirkan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Melakukan pembinaan Bunda Literasi Kecamatan dan Kampung serta TIM Literasi Kecamatan
- Melaksanakan Program Gemar Membaca dan Menulis di semua kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan membaca menulis berupa tulisan setiap kecamatan yang mengirimkan

1000 tulisan diakhir februari lalu diterima di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah.

- Bunda Literasi Kecamatan dan Kampung serta TIM membenahi Taman Bacaan Masyarakat yang berbasis Inklusi Sosial melaporkan hasil pembinaan di FKWT Berjaya dan mendata 1000 TBM yang akan di SK kan.
 - Bunda literasi melakukan kunjungan disekolah SLTA bertujuan uuntuk mensosialisasikan Gerakan Membaca dan Menulis buku di sekolah mapun di rumah dan literasi Digital.
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
- Melakukan pembinaan terhadap TBM berbasis Inklusi Sosial dengan mengirimkan bukti foto kegiatan TBM tersebut dengan bermacam-macam kegiatan yang di upload di aplikasi PIC, dengan masing-masing TBM meng upload 10 kegiatan yang berbasis Inklusi Sosial
 - Mendampingi Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah melakukan Kunjungan ke 6 (enam) Taman Bacaan masyarakat (TBM) berbasis Inklusi Sosial
 - Bunda Literasi melakukan pembinaan kepada

Bunda Literasi Kecamatan dan Kampung
serta Tim Literasi Kecamatan

- Bunda Literasi melakukan Storytelling
 - Melaksanakan kegiatan Menggambar untuk tingkat SD dan mewarnai untuk tingkat TK/PAUD
 - Melakukan Pameran Literasi TBM dan sekolah anak SD dan TK/PAUD
 - Kunjungan Bunda Literasi di tingkat SLTA dalam sosialisasi literasi digital.
 - Melakukan kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Baca Mandiri dengan memberikan pelatihan membuat tanaman hidroponik bahwa dengan mereka membuat tanaman hidroponik bisa menjadi penghasilan dalam meningkatkan ekonomi pada keluarga.
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
Kegiatan dilaksanakan oleh bidang arsip dengan melakukan konsultasi ke beberapa kecamatan yang ada di Lampung Tengah terkait naskah kuno.
- ✓ **Rata-rata lama sekolah (MYS)** tahun 2024 realisasi sebesar 7,97. Hal ini menunjukkan secara rata-rata

penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang berusia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 7,97 tahun. Angka rata-rata lama sekolah yang tinggi menunjukkan tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kompetensi yang dimilikinya akan semakin tinggi pula, hal tersebut berdampak pada prilaku dan pola pikirnya. Jika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi maka besar harapannya untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan yang baik. Makin rendah tingkat pendidikan seseorang berdampak pada rendahnya kualitas hidup yang bisa ia dapatkan. Tidak dapat dipungkiri semakin tinggi pendidikan seseorang maka pekerjaan, penghasilan, dan posisi sosialnya akan semakin tinggi pula. Melalui pendidikan diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun.

Pada dasarnya layanan pendidikan formal dibatasi oleh usia anak yang berhak memasukinya, yaitu pada jenjang SD anak yang berhak adalah usia 7-12 tahun, jenjang SMP berada direntan usia 13-15 tahun, dan jenjang SMA/SMK berada diusia 16-18 tahun. Penduduk yang berada diatas usia tersebut dan belum menyelesaikan pendidikan formalnya maka diberikan kesempatan melalui jalur pendidikan nonformal yang berupa pendidikan kesesatraan paket A, B, dan juga C yang setara dengan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.

Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk melayani masyarakat yang tidak tersentuh oleh pendidikan formal. Program ini memiliki tiga jenjang, yaitu : Program Paket A setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs, dan Program Paket C setara SMA/MA. Program pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya. Program ini merupakan program pengganti dari pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk mendapatkan layanan pendidikan wajib mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, khusus bagi masyarakat yang tidak terlayani melalui pendidikan formal.

Layanan pendidikan kesetaraan ini merupakan wujud nyata dari pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Program pendidikan kesetaraan tidak mengenal batas usia, dalam pendidikan nonformal semua masyarakat dapat mengaksesnya, terutama masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya oleh pendidikan formal. Maka untuk masyarakat usia 25 tahun ke atas yang belum mengikuti pendidikan dasar dan menengah disarankan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

Penguatan sektor pendidikan formal dan nonformal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat. Jika

seluruh penduduk usia sekolah dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun hingga jenjang pendidikan menengah (SMA/K, MA, Paket C) dan penduduk usia non sekolah yang belum tersentuh pendidikan formal mendapatkan pelayanan pendidikan kesetaraan maka angka Rata-rata lama sekolah akan otomatis meningkat tajam. Selain itu pendataan untuk anak tidak sekolah dan putus sekolah menjadi solusi serta langkah strategis dalam upaya peningkatan angka Rata-rata lama sekolah. Anak tidak sekolah dan putus sekolah menjadi sasaran utama dalam program pendidikan kesetaraan, melalui pendataan dan pendanaan yang tepat.

Jika para siswa usia sekolah tidak menyelesaikan pendidikannya dengan alasan tertentu atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maka dapat dipastikan angka Rata-rata lama sekolah ditahun-tahun mendatang akan menurun. Sehingga pemerintah harus memperhatikan pendidikan bagi seluruh penduduk baik yang termasuk dalam usia sekolah maupun tidak. Para penyelenggara pendidikan kesetaraan (SKB dan PKBM) perlu didorong untuk melakukan identifikasi dan mengajak masyarakat putus sekolah agar mau mengikuti pendidikan agar layanan pendidikan kesetaraan dapat terselenggara secara optimal.

Perhatian khusus dalam aspek pendidikan merupakan faktor keberhasilan dari peningkatan angka Rata-rata lama sekolah, yang berupa penguatan anggaran dan

pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. Penguatan akses untuk sektor pendidikan formal dan nonformal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat. Melalui layanan pendidikan yang bermutu maka akan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan Langkah-langkah melalui Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui program ini memiliki indikator (RPJMD) Meningkatnya Presentase guru yang bersertifikasi. Program Pengelolaan Pendidikan Ditunjang oleh Kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan sub kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

- ✓ **Lama harapan sekolah (EYS)** tahun 2024 sebesar 13,17, hal ini menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,17 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini mengalami peningkatan 0,13 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 13,04.

Melalui program pengelolaan pendidikan, Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya dalam menggerakkan masyarakat, melalui sosialisasi-sosialisasi di setiap kegiatan pendidikan serta melalui media sosial, Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berinovasi dan berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dengan pemerataan pembangunan sekolah-sekolah terus diupayakan

Dalam Upaya Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Lama Harapan Sekolah (EYS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2024 melaksanakan:

- Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, dengan cara:
 - a)** Pengadaan Perlengkapan PAUD sebanyak 6350 paket berupa buku gambar dan crayon dan Alat Permainan Edukasi (APE) luar berupa ayunan berhadapan dan panjatan bola dunia;
 - b)** Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - c)** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yang diikuti oleh 741 tenaga pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi berupa bimbingan teknis;

- d)** Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD pada 741 satuan pendidikan berupa Bimtek Implementasi ARKAS pada satuan PAUD dan PNF, Bimtek Operator PAUD dan PNF, pendampingan BOP PAUD, pendampingan PAUD-HI dan lomba UKS;
- e)** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD berupa pembangunan ruang kelas baru sebanyak 4 unit;
- f)** Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebanyak 5 paket;
- g)** Pengelolaan Dana BOP PAUD kepada 24.920 satuan pendidikan se kabupaten Lampung Tengah;
- h)** Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kepada 4.528 satuan Pendidikan;
- i)** 56 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan berupa Pendampingan/Advokasi Perencanaan Berbasis Data Jenjang PAUD, Pendampingan/Advokasi PBD Jenjang PAUD dan PNF, dan Pendampingan/Advokasi Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) Jenjang PAUD yang diselenggarakan pada 26 satuan pendidikan
- Peningkatan Pengelolaan Akses Pendidikan Dasar
 - a)** Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebanyak 5 ruang tahun 2024 di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;
 - b)** Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terselenggara di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 11 ruang;

- c)** Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah sebanyak 6 unit berupa pembangunan toilet/jamban di wilayah timur, barat, dan tengah kabupaten Lampung Tengah;
- d)** Pengadaan Mebel Sekolah diselenggarakan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 40 paket;
- e)** Pengadaan Perlengkapan Sekolah berupa tas sekolah, buku tulis, ballpoint, pensil 2B, dan seragam sekolah sebanyak 500 paket se kabupaten Lampung Tengah;
- f)** Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa berupa pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebanyak 178 paket;
- g)** Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa merupakan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar yang digunakan untuk memfasilitasi siswa yang mengikuti jenjang kompetisi/lomba akademik dan non akademik. Tahun 2024 ini sebanyak 250 peserta didik ikut berpartisipasi dalam kegiatan kompetisi seperti FLS2N DAN O2SN;
- h)** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berupa pengadaan kegiatan bimbingan teknis, workshop, dan lainnya dengan 728 partisipan;
- i)** Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah berupa Kegiatan Pelatihan BOS dan RKAS, sosialisasi, pelatihan proctor, Bimbingan Teknis Persiapan Akreditasi, Bimbingan teknis Implementasi

Kurikulum Merdeka yang diselenggarakan pada 728 satuan pendidikan;

- j)** Pembangunan Laboratorium Dasar sebanyak 8 ruang di kabupaten Lampung Tengah;
- k)** Pembangunan Ruang Kelas Baru yang dibangun tahun 2024 sebanyak 30 ruang;
- l)** Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebanyak 42 unit tersebar di Kabupaten Lampung Tengah;
- m)** Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 80 unit tersebar di Kabupaten Lampung Tengah;
- n)** Pembangunan Laboratorium dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 4 ruang;
- o)** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 5 unit berupa pembangunan jamban/toilet di sekolah menengah pertama (SMP);
- p)** Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebanyak 30 ruang berupa rehab ruang kelas di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;
- q)** Pengadaan Mebel Sekolah sebanyak 30 paket yang tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur kabupaten Lampung Tengah;
- r)** Pengadaan Perlengkapan Sekolah sebanyak 500 paket berupa tas sekolah, buku tulis, ballpoint, pensil 2B, seragam pramuka dan putih biru;
- s)** Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa berupa 81 paket pengadaan multimedia dan media pendidikan;

- t) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP berupa kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi workshop sebanyak 235 orang;
 - u) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan menghasilkan keluaan sebanyak 350 dokumen;
 - v) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 70 unit yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah.
- Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan berupa kegiatan gebyar guru penggerak, pelatihan chromebook bagi tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah, refleksi PMO program sekolah penggerak, sosialisasi perencanaan berbasis data untuk kepala sekolah

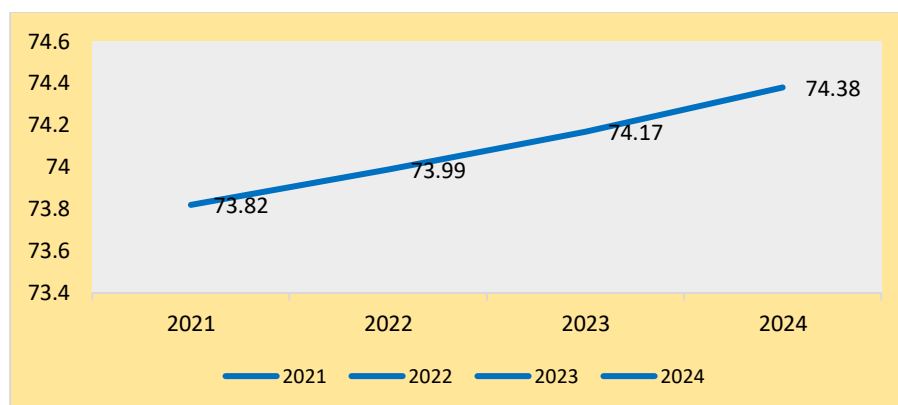
✓ **Usia Harapan Hidup**

Di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 untuk usia harapan hidup (UHH) sebesar 74,38 tahun dengan target 74,17 tahun, dengan capaian sebesar 100,28 tahun yang artinya sangat berhasil. Adapun faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah meningkatnya pelayanan Kesehatan, meningkatnya pelayanan kesehatan, mampu mempunyai pendidikan

yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai sehingga akan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke- x . Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dapat diketahui melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH), gambaran realisasi kinerja tahun sebelumnya disajikan pada grafik berikut ini :



Pada tahun 2024, capaian indikator sasaran Usia Harapan Hidup (UHH) adalah 74,38 tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi 2 tahun sebelumnya, realisasi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk UHH tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah menduduki peringkat ke 5 (lima) dari 15 Kabupaten/Kota.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya pelayanan Kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai Pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Dengan demikian keberhasilan program Kesehatan terutama dalam pencapaian indeks Kesehatan dan usia harapan hidup

bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab Bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat. Adapun faktor pendorong tercapainya usia harapan hidup (UHH) dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

- a) Meningkatnya akses terhadap pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah, dapat dilihat dari jumlah fasilitas Kesehatan yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:
 - 1) 39 Puskesmas, 121 Puskesmas Pembantu, 35 unit Puskesmas Keliling, 1 RSUD, 9 RS Swasta;
 - 2) Adanya Penambahan Klinik Swasta dari 62 klinik di tahun 2023 menjadi 71 Klinik di tahun 2024.

Selain fasilitas Kesehatan, di Kabupaten Lampung Tengah juga terdapat Sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, seperti tabel dibawah ini:

No.	Sarana UKBM	Jumlah	
		2023	2024
1.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	1.462	1.463
2.	Posyandu Lansia	163	356
3.	Pos Kesehatan Pesantren	0	0
4.	Pos Bindu PTM	167	319
5.	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	142	142
6.	Saka Bakti Husada (SBH)	39	38
7.	Kader Kesehatan	7.992	7.992

- b) Dalam mendukung indikator usia harapan hidup capaian program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2024, dapat dilihat dari

hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap faktor pendorong tercapainya indikator tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Jumlah profesi nutrisisionis mengalami peningkatan dengan dikontraknya tenaga ahli profesi dengan menggunakan dana BLUD dan CPNS yang tersebar hampir merata di seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah. Peningkatan jumlah tenaga Kesehatan ini berdampak positif pada meningkatnya system surveilans gizi. Sistem ini mulai berjalan dengan lebih integratif sehingga penemuan kasus dapat lebih menyusur ke lokasi yang lebih terpencil, sehingga intervensi pun dapat dilakukan dengan maksimal.
- 2) Meningkatnya jumlah Posyandu karena tingginya peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam bidang Kesehatan.
- 3) Menurunnya angka kematian bayi, dari 112 kasus di tahun 2022 menjadi 100 kasus di tahun 2023 dan di tahun 2024 menjadi 93 hal ini dikarenakan adanya :
 - Jumlah tenaga Kesehatan yang meningkat baik CPNS maupun P3K dan tenaga ahli profesi di Kabupaten Lampung Tengah yang tersebar di Puskesmas, yang memberikan dampak positif pada system surveilans Kesehatan ibu dan anak sehingga penemuan

ibu hamil resiko tinggi dapat segera ditemukan dan ditangani untuk diberi intervensi lebih lanjut dalam mencegah terjadinya komplikasi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil resiko tinggi tersebut.

- Penguatan pelayanan Kesehatan bayi di fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan di kabupaten Lampung Tengah sudah terorientasi kegawatdaruratan pada Neonatal, penanganan bayi berat lahir rendah (BBLR) dan manajemen asfiksia sehingga ketika menemukan kasus komplikasi pada bayi baru lahir dapat langsung tertangani dengan baik.
- Peningkatan pengetahuan ibu hamil, bersalin, nifas, keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita mengenai faktor-faktor resiko dan komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas sehingga pengambilan keputusan tidak terlambat.
- Rujukan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dapat langsung mengakses FKTRL sehingga komplikasi pada bayi dapat tertangani dengan baik.

- ✓ **Prevalensi Intervensi Stunting** di Tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023 yaitu sebesar 7,6 persen, dikarenakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di Tahun 2024 belum keluar

Banyak faktor yang mengakibatkan tingginya prevalensi stunting. Penyebab langsungnya bisa karena kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi, faktor lainnya yaitu pola asuh yang salah, sanitasi, hygiene yang buruk dan rendahnya pelayanan kesehatan. Di samping itu masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah, karena di masyarakat dianggap sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal. Dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah dengan 539 Rute yang dilakukan pemeriksaan ditemukan kasus stunting pada balita sebanyak 41 balita (7,6%) dari jumlah balita yang diukur tinggi badan. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin kasus stunting mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang bertujuan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, mengukur capaian target indikator RPJMD, Renstra dan SDGs antara lain status Kesehatan, status gizi, Kesehatan lingkungan, perilaku Kesehatan, dan berbagai aspek pelayanan Kesehatan.

Capaian kinerja terkait permasalahan gizi masyarakat secara umum menunjukkan peningkatan yang positif, hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

- Adanya regulasi (SK Bupati Kabupaten Lampung Tengah) terkait lokus penanganan stunting sehingga kegiatan intervensi bisa dilakukan secara maksimal.
- Keterlibatan lintas sektor dalam penanganan stunting sudah dilakukan secara maksimal.
- Adanya dukungan pemerintah daerah termasuk perangkat desa dalam penanganan stunting melalui alokasi dari dana desa.
- Promosi Kesehatan dan informasi sadar hidup sehat yang terus dilakukan.
- Kegiatan posyandu yang terus dioptimalkan pelaksanaannya termasuk kegiatan imunisasi serta pemberian vitamin A dan obat cacing.
- Program pemberian makanan tambahan (PMT).
- Adanya program Gerakan masyarakat hidup sehat

Selain itu pada tahun 2024 melalui bidang Ketahanan dan Kesejahteraan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan inovasi dalam penurunan angka stunting yang dituangkan dalam kegiatan Konsentrasi Remaja Cegah Stunting (Konser Ceting). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melibatkan para remaja diantaranya Saka Kencana (Pramuka), Generasi Berencana (Genre) dan PIK-R, yang

kegiatannya berupa perkemahan yang didalamnya mengusung tema pencegahan stunting dan diedukasi oleh para remaja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut diadakan di daerah yang Lokus stunting sehingga dalam kegiatan tersebut diharapkan kepada masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pencegahan stunting sejak dini.



Sebagai upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melibatkan para remaja untuk konsentrasi dalam penurunan stunting. Tujuan dari kegiatan konser ceting ini dilaksanakan adalah untuk mengenali masalah stunting, menganalisis faktor penyebab stunting serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, membina remaja dan ibu-ibu PKK. Salah satu upaya untuk mencegah stunting tedapat beberapa langkah diantaranya perbaiki gizi dan kesehatan, melakukan inisiasi menyusui dini dan asi eksklusif, memberikan MPASI yang berkualitas, pantau pertumbuhan anak dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini akan mencegah generasi mendatang dari stunting.

Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan stunting yang diataranya yaitu kegiatan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sampai dengan kegiatan Audit Kasus Stunting, yang dimulai dengan diskusi yang melibatkan Tim Pakar seperti ahli gizi, kesehatan masyarakat dan dokter anak yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab stunting diwilayah

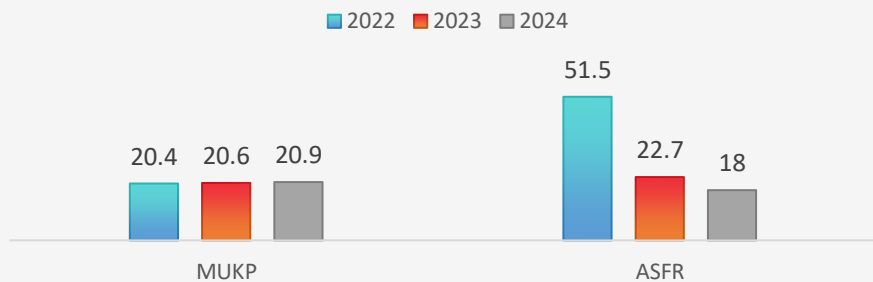
tersebut. Dengan diskusi tersebut juga membuka peluang untuk belajar dari praktik terbaik dan inovasi yang telah berhasil di daerah lain, sehingga strategi penurunan stunting di Lampung Tengah dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, audit kasus stunting dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih terarah untuk mencapai Lampung Tengah bebas stunting di masa depan. Berikut dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting yang di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah.

Rapat Koordinasi Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS) dan Audit
Kasus Stunting (AKS)

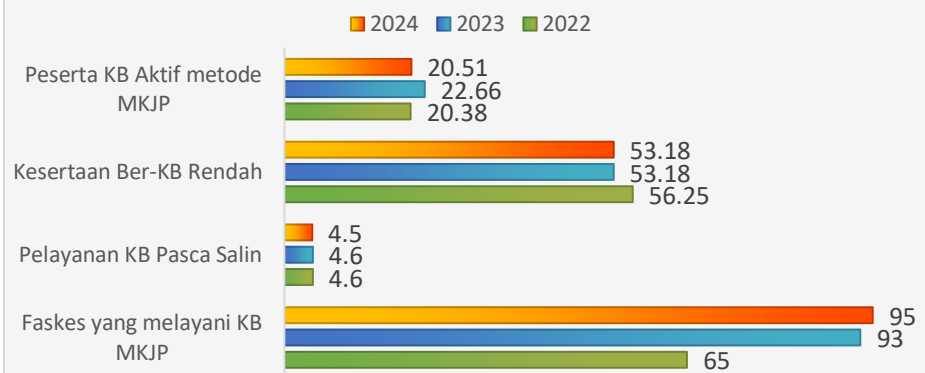


- ✓ **Laju Pertumbuhan Penduduk** Tahun 2024 sebesar 1,11 persen, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,04 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,15 persen. Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas PPKB melakukan upaya-upaya, yaitu:

Age Spesifik Fertility Rate/ASFR (15-19th) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)



SASARAN STRATEGIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA



- Kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Kegiatan ini merupakan kegiatan penggerakan KB baik itu yang MKJP maupun jenis kontrasepsi yang non MKJP. Dalam kegiatan ini terdapat pelayanan KB yang dilaksanakan bertempat di faskes-faskes dan tempat pelayanan KB lainnya. Selain itu kegiatan ini juga telah melakukan inovasi dengan melakukan pelayanan KB keliling oleh Tim KB

Keliling (TKBK) yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat (Pasangan Usia Subur) sampai ketingkat kampung ataupun Dusun yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, dengan bersinergi dengan adanya program Bupati Ngantor di Dusun (Bunga Kampung Mekar Di Dusun). Dengan begitu hal ini sangat mendukung dan menjadi salah satu penunjang keberhasilan dengan peningkatan capaian kinerja. Berikut dokumentasi kegiatan Pelayanan KB yang dilaksanakan di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya pencegahan kehamilan yang merupakan salah satu yang berperan dalam penurunan stunting.



- Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat mendukung keberhasilan kinerja, karena kegiatan ini merupakan kegiatan penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Sampai dengan tahun 2022 kampung KB yang terbentuk baru 43 kampung KB, namun sekarang di tahun 2024 kampung KB telah terbentuk sebanyak 311 kampung yang tersebar di 28 kecamatan, artinya untuk seluruh kampung/kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah telah terbentuk menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri mendapat penghargaan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung sebagai Juara II Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi dan pada tahun 2024 melalui Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih juga mendapatkan penghargaan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung sebagai Juara II atas Apresiasi dalam

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) tingkat Provinsi Lampung.



- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Capaian Daerah Kabupaten Kota; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja berupa kegiatan pertemuan dengan stakeholder dan mitra kerja untuk membentuk komitmen terhadap Program Bangga Kencana serta penurunan stunting di tingkat lini lapangan; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal, berupa kegiatan cetak umbul-umbul/banner yang berisikan pesan program Bangga Kencana pada momentum strategis dan berkearifan lokal sebagai pendukung kinerja kader di Lini Lapangan; Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media Massa, Cetak dan elektronik sert

media luar ruangan, berupa kegiatan cetak leaflet yang meanyangkan pesan program Bangga Kencana; Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), berupa kegiatan pertemuan yang diinisiasi oleh pengurus TP PKK kecamatan dan dipimpin oleh camat dengan melibatkan kepala puskesmas, tenaga gizi, dokter, bidan, penyuluh KB, kapolsek danramil dan lain sebagainya yang dilaksanakan di 28 kecamatan dan dilakukan 12 kali dalam setahun; kegiatan Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) berjumlah 540 orang yang dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan yang berlokasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah; Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

- ✓ **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** tahun 2024 sebesar 62,16 mengalami peningkatan 2,78 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 59,38. Melalui Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

(KS), Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Dinas terkait serta lintas sector seperti BKKBN, Organisasi profesi (IBI, IDI), TNI, Departemen Agama terus berinovasi dalam meningkatkan indeks pembangunan keluarga melalui Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB); Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Masa, cetak dan elektronik serta media luar ruangan; Pembinaan terpadu Kampung KB; Orientasi/ pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS); Orientasi/pelatihan Teknis Pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS; Orientasi/ pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS; Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota.

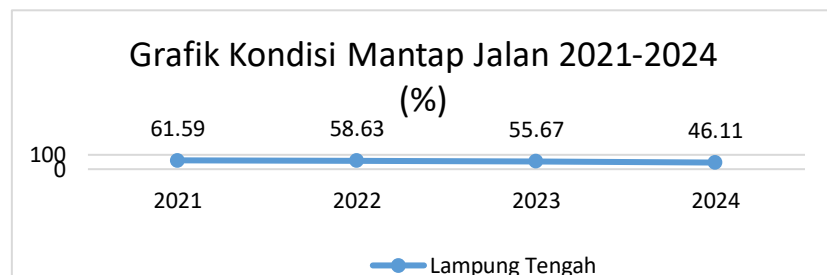
iBANGGA merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan

keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. untuk membangun keluarga harus dimulai dengan pendidikan berkeluarga. Pemerintah pun tengah menggalang program prioritas bimbingan pranikah guna mempersiapkan keluarga Indonesia yang tangguh sehingga nantinya mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Hal tersebut didasari oleh landasan hukum Undang-Undang No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

2. Pada Misi II rata-rata capaian sebesar 100,75% terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja, jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada misi II dalam kategori sangat baik.

✓ **Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten**

Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan tahun 2024 memiliki jalan sepanjang 1.119.673 km, dengan kondisi jalan mantap sepanjang 516.234 km atau sebesar 46,11% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 55,67% atau sepanjang 623.300 km.



Untuk meningkatkan kualitas kemantapan jalan harus dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan peningkatan jalan, pemeliharaan berkala jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan kemantapan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan pemeliharaan berkala jalan.

Berdasarkan hasil survey kondisi jalan tahun 2024, tingkat kondisi kemantapan jalan yang merupakan IKU Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat melampaui target 59,62%, yakni hanya mencapai 46,11%. Dengan pencapaian tersebut, maka sepanjang 516,234 km ruas jalan Kabupaten berada dalam kondisi mantap.

Dengan keterbatasan anggaran yang ada dalam menjaga kondisi kemantapan jalan Kabupaten, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Jalan di ruas – ruas jalan kabupaten prioritas utama guna menunjang perekonomian

Kabupaten Lampung Tengah dengan rincian, Peningkatan Jalan sepanjang 31,815 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan sepanjang 11,098 Meter dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 13,909 Meter.

Pada tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah melakukan Pembangunan infrastruktur jalan di ruas-ruas jalan Kabupaten, yaitu:

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Poncowati - Purnama Tunggal Kec. Terbanggi Besar sepanjang 4,420 Km.



Peningkatan Jalan Ruas Jalan Wates - Notoharjo Kec. Bumi Ratu Nuban sepanjang 3,250 Km

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kalidadi - Sendang Mulyo (R.244) Kec. Kalirejo sepanjang 1,296 Km.





- ✓ **Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten** Tahun 2024 sebesar 89,45. Indikator ini berbanding lurus dengan indikator tingkat kemantapan jalan, semakin tinggi realisasi kemantapan jalan, maka aksesibilitas jalan kabupaten juga akan tinggi. Pada tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi telah melakukan pembangunan, seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No	Pekerjaan (Sub-Kegiatan)	Target	Realisasi
1	Pembangunan Jalan	5,343 Km	5,343 Km
2	Rekontruksi Jalan	31,815 Km	31,815 Km
3	Pemeliharaan Berkala Jalan	11,098 Km	11,098 Km
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	13,909 Km	13,909 Km
5	Pembangunan Jembatan	6 Meter	6 Meter
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	114 Meter	114 Meter
7	Pembangunan Talud/Drainase/Plat Dekker	21.624 Meter	21.624 Meter

✓ **Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota**

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar 72 persen. Hasil ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 64%. Hal ini dikarenakan jumlah kebutuhan trayek terlayani meningkat pada tahun 2024. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada indikator ini, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, melakukan perbaikan-perbaikan, serta melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah:

1. Menyediakan angkutan untuk anak sekolah sebanyak 5 unit bus sekolah;
2. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota terutama pada lebaran, natal, dan tahun baru;
3. Menyediakan pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

✓ **Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota**

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar 0,26 mengalami penurunan kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,22 . Menurunnya kinerja lalu lintas ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu meningkatnya pertumbuhan kendaraan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2023 jumlah kendaraan

yang terdaftar di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 537.553 kendaraan, naik sebesar 3,35% pada tahun 2024 sebesar 555.612 kendaraan. Adanya peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut menjadi faktor menurunnya kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja lalu lintas Kabupaten Lampung Tengah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan inovasi-inovasi, yaitu:

1. Mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas;
2. Menempatkan para petugas lapangan secara intensif untuk pengawasan, pengendalian dan pengaturan lalu lintas;
3. Menjaga keutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas yang dipasang dengan menumbuhkan kesadaran dan ikut menjaga kondisi fasilitas lalu lintas serta memberikan himbauan kepada para kepala kampung/desa agar dapat mensosialisasikan aset daerah yang perlu dijaga keutuhannya.

✓ **Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Dengan IP>2**

Persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2 yang dikelola tahun berkenaan (dalam satu tahun) berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 60 persen

dengan realisasi sebesar 57,41 persen, sehingga dapat dicapai sebesar 95,68 persen dengan perhitungan luas areal sawah Daerah Irigasi IP>2 Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah dibanding dengan luas sawah irigasi IP>2 tertinggi dalam 3 tahun terakhir Berdasarkan kewenangan pengelolaannya, daerah irigasi yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah daerah irigasi yang luas arealnya diatas 3000 ha, Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas arealnya 1000 ha s/d 3000 ha dan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten adalah kurang dari 1000 ha. Dengan Kondisi saluran irigasi di tahun 2024, seperti tabel dibawah ini:

KONDISI SALURAN	TIPE SALURAN						JUMLAH
	PRIMER		SEKUNDER		TERSIER		
	(METER)	(%)	(METER)	(%)	(METER)	(%)	
BAIK	34.488	20,36	3.717	28,07	15.547	16,44	53.748
SEDANG	97.195	57,37	7.930	59,94	60.530	64,00	165.655
JELEK	37.737	22,27	1.587	12,00	18.503	19,56	57.827
TOTAL	169.420		13.230		94.580		277.230

Iklim mempengaruhi pola dan waktu tanam, cekaman kekeringan menjadi ancaman saat ketersediaan air tidak mencukupi sehingga ketidaktepatan waktu tanam padi dapat menurunkan hasil atau bahkan kegagalan panen. Penanganan kondisi infrastruktur irigasi belum dilakukan secara optimal sehingga ketersediaan air tidak memadai. Tersedianya air yang cukup untuk tanaman akan dapat memperpanjang masa tanam dan memperluas areal pertanaman. Dalam arti IP akan meningkat dan petani dapat

membuka lahan pertanian baru sesuai dengan ketersediaan air.

Upaya peningkatan IP dan peningkatan luas areal sawah yang terairi jaringan irigasi yaitu :

1. Bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam mengembangkan inovasi pembangunan irigasi air tanah atau sumur bor
2. Penajaman usulan musrenbang Kampung dan Kecamatan yang diperkuat dengan usulan dewan
3. Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi
4. Melakukan peningkatan jaringan irigasi
5. Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
6. Membuat skala prioritas beberapa Daerah Irigasi yang kondisi saluran nya tidak baik
7. Menjaga ketersediaan air di bagian hulu dan lingkungan di sekitar bantaran sungai
8. Memberi himbauan untuk tidak membangun bangunan disekitar bantaran sungai
9. Sosialisasi kepada P3A tentang pemanfaatan debit air yang ada secara maksimal dan mematuhi jadwal pola tanam

✓ **Jumlah Luas Kawasan Kumuh**

Berdasarkan SK Bupati Lampung Tengah Nomor 318/KPTS/D.a.VI.05/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 5 (lima) lokasi

kawasan kumuh yaitu Gunung Sugih (3,49 Ha), Komering Agung (10,13 Ha), Seputih Jaya (15,09 Ha), Yukum Jaya (6,86 Ha), dan Bandar Jaya Barat (7,10 Ha) dengan total luasan 42,68 Ha. Luasan tersebut di tahun 2024 menurun menjadi 6,67 Ha jika dibandingkan dengan luasan kawasan kumuh pada tahun 2021.

Terdapat 7 (tujuh) aspek indikator penilaian kawasan permukiman kumuh, yaitu:

- 1) Kondisi bangunan gedung: ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan;
- 2) Kondisi jalan lingkungan: cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan;
- 3) Kondisi penyediaan air minum: ketersediaan akses aman air minum, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum;
- 4) Kondisi drainase lingkungan: ketidakmampuan mengalirnya limpasan air, ketidaktersediaan drainase, kualitas drainase;
- 5) Kondisi pengelolaan air limbah: sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
- 6) Kondisi pengelolaan persampahan: prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar

teknis;

- 7) Kondisi proteksi kebakaran: ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran, ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran.

Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya dalam penanganan kawasan kumuh adalah melalui pembangunan drainase sepanjang 200 m di Kelurahan Yukum Jaya. Namun kegiatan tersebut belum mampu mengurangi luasan kawasan kumuh di Kelurahan Yukum Jaya karena terdapat 6 aspek indikator penilaian lainnya yang perlu ditangani namun mengurangi presentase kekumuhannya dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 14. Perhitungan Penanganan Kawasan Kumuh

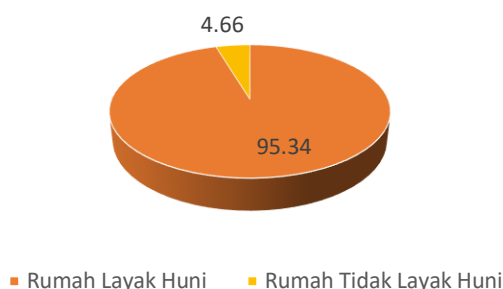
Lokasi	Luasan Kumuh	%	RT	Luasan Intervensi Pembangunan Drainase 2024	Skoring	Koordinat	Tingkat Kumuh	Ket
Yukum Jaya	6,86 Ha	1,87%	002	110 m ²	Luasan Kumuh Tetap	-4,924418	Kumuh Ringan	% Kumuh saja yang berkurang
		33,67%	003	98 m ²	Luasan Kumuh Tetap	-4,983387	Kumuh Ringan	

Sumber: Olahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya, 2025

✓ Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni di tahun 2024 sebesar 4,66%.
Dari 399.441 Rumah tangga

Perkembangan Jumlah Rumah Sehat Tahun 2023



Rumah sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Rumah yang sehat atau layak huni akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi penghuninya. Sedangkan rumah yang tidak sehat atau tidak layak huni tidak dapat memberikan fungsi dan manfaat yang optimal bagi penghuninya. Rumah tidak layak huni akan berpengaruh pada tingkat produktivitas, kesehatan, keamanan, dan keselamatan bagi keluarga yang menghuninya. Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki salah satu tugas dan kewenangan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas rumah bagi MBR di tingkat kabupaten. Dalam hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya berupaya untuk menangani rumah tidak layak huni dengan program stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Adapun beberapa kriteria rumah layak huni diantaranya adalah struktur bangunan yang memenuhi standar SNI, penggunaan material yang tidak berpotensi melepaskan zat-zat berbahaya, luasan lantai paling sedikit 36m² tersedianya ventilasi udara yang cukup, sumber pencahayaan alami dan buatan.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya adalah pemberian bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Target penanganan RTLH tahun 2024 adalah 150 unit rumah dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Akumulasi capaian peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni 2021-2024 adalah sebesar 813 unit rumah atau sudah tercapai 81,3% dari total target 1.000 unit rumah hingga 2026.



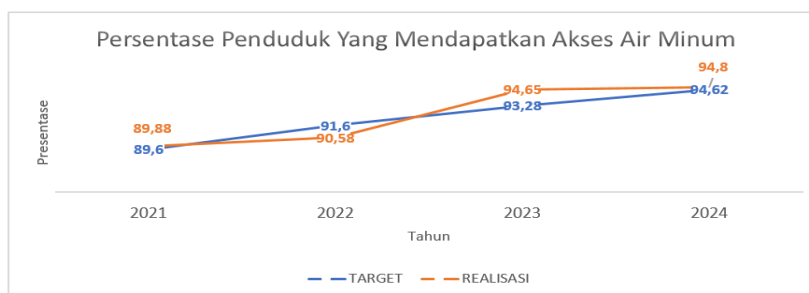
Gambar 3. Foto Rumah Sebelum dan Sesudah Peningkatan Kualitas

Kegiatan tersebut tersebar pada 19 kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan rincian sebagai berikut

No	Lokasi Perbaikan RTLH	Jumlah (Unit)
1	Kampung Srikaton, Kec. Seputih Surabaya	10
2	Kampung Mataram Ilir, Kec Seputih Surabaya	23
3	Kampung Tanjung Harapan, Kec. Anak Tuha	6
4	Kampung Kuripan, Kec. Padang Ratu	2
5	Kampung Margorejo, Kec. Padang Ratu	5
6	Kampung Gunung Haji, Kec. Pubian	10
7	Kampung Negeri Katon, Kec. Selagai Lingga	3
8	Kampung Tanjung Ratu, Kec. Selagai Lingga	2
9	Kampung Sidodadi, Kec. Bangun Rejo	5
10	Kampung Sri Way Langsep, Kec. Kalirejo	3
11	Kampung Sukosari, Kec. Kalirejo	2
12	Kampung Lempuyang Bandar, Kec. Way Pengubuan	3
13	Kampung Gunung Batun Udik, Kec. Terusan Nunyai	1
14	Kampung Gunung Batun Baru, Kec. Terusan Nunyai	2
15	Kampung Komering Putih, Kec. Gunung Sugih	2
16	Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kec. Terbanggi Besar	1
17	Kampung Adi Jaya, Kec. Terbanggi Besar	3
18	Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar	2
19	Kampung Karang Endah, Kec. Terbanggi Besar	3
20	Kampung Onoharjo, Kec. Terbanggi Besar	2
21	Kampung Buyut Baru, Kec. Seputih Raman	5
22	Kampung Rama Indra, Kec. Seputih Raman	5
23	Kampung Ratna Chaton, Kec. Seputih Raman	3
24	Kampung rukti Harjo, Kec. Seputih Raman	2
25	Kampung Subing Karya, Kec. Seputih Mataram	1
26	Kampung Kurnia Mataram, Kec. Seputih Mataram	1
27	Kampuyng Bumi Setia, Kec. Seputih Mataram	1
28	Kampung Mataram Jaya, Kec. Bandar Mataram	3
29	Kampung Badran Sari, Kec. Punggur	2
30	Kelurahan Adipuro, Kec. Trimurjo	3
31	Kampung Nambah Rejo, Kec. Kotagajah	5
32	Kampung Gaya Baru II, Kec. Seputih Surabaya	4
33	Kampung Gaya Baru VI, Kec. Seputih Surabaya	7
34	Kampung Gaya Baru VII, Kec. Seputih Surabaya	4
35	Kampung Sumber Katon, Kec. Seputih Surabaya	1
36	Kampung Rajawali, Kec. Bandar Surabaya	3
37	Kampung Surabaya Baru, Kec. Bandar Surabaya	1
38	Kampung Sidodadi, Kec. Bandar Surabaya	1
39	Kampung Bumi Nabung Timur, Kec. Bumi Nabung	8
Total		150

✓ Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Aman Terhadap Air Minum Layak atau Aman

Pada Tahun 2024, Dari 399.441 Rumah Tangga, Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Aman Terhadap Air Minum Layak atau Aman sebesar 378.690 atau sekitar 94,80 % dari total Rumah Tangga di Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 4. Grafik Capaian IKU 2 Tahun 2021-2024

Indikator kinerja tersebut telah terealisasi dengan baik memenuhi target dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun	0,5 liter/detik	2 liter/detik	100%
2	Operasi SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan dioperasikan dan dipeliharaan	4	4	100%

Pemenuhan akses air bersih dan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk. Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan presentase penduduk yang memiliki akses air minum

adalah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pembangunan SPAM jaringan perpipaan dan SPAM non jaringan perpipaan dengan rincian sebagai berikut:

NO	DAFTAR PEMBANGUNAN SPAM
A.	SPAM Komunal
1	Pembangunan sumur pompa mesin dalam lebih dari 40 m dengan jaringan perpipaan berupa sambungan rumah (SR) ke masyarakat (Sumur Bor Komunal) RT 14 RW 04 Kampung Bumimas, Kec. Seputih Agung
2	Pembangunan sumur pompa mesin dalam lebih dari 40 m dengan jaringan perpipaan berupa sambungan rumah (SR) ke masyarakat (Sumur Bor Komunal) Dusun 1 RT 01 RW 02 Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar
3	Pembangunan sumur pompa mesin dalam lebih dari 40 m dengan jaringan perpipaan berupa sambungan rumah (SR) ke masyarakat (Sumur Bor Komunal) Kampung Putra Lempuyang, Kec. Way Pengubuan
4	Pembangunan sumur bor komunal Kampung Bandar Jaya Timur, Kec. Terbanggi Besar
5	Pembangunan sumur bor komunal Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kec. Way Pengubuan
6	Pembangunan sumur bor komunal Kampung Buyut Baru, Kec. Seputih Raman
7	Pembangunan sumur bor komunal Kampung Banjar Mulya, Kec. Gunung Sugih
8	Pembangunan sumur bor komunal Kampung Tanjung Krajan, Kec. Seputih Banyak
9	Pembangunan sumur bor komunal Kampung Payung Rejo, Kec. Pubian
10	Pembangunan sumur bor komunal Kampung Rama Oetama, Kec. Seputih Raman
B.	Pembangunan Sumur Pompa Mesin (SPM)
1	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) Baitul Mutakim, Dusun XI Kampung Gaya Baru IV Kec. Seputih Surabaya
2	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) Dusun 2 Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya
3	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) Dusun 8 Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya
4	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) Gereja HKBP, Dusun I Kampung Gaya Baru 2 Kec. Seputih Surabaya
5	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) Mushala Nurul Huda, Dusun 6 Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya
6	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) Mushala Nurul Iman, Dusun 4 Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya
7	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) Mushala Riyadhotul Ulum, Dusun 12 Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya
8	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) Mushola Darusalam, Dusun 6 Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya

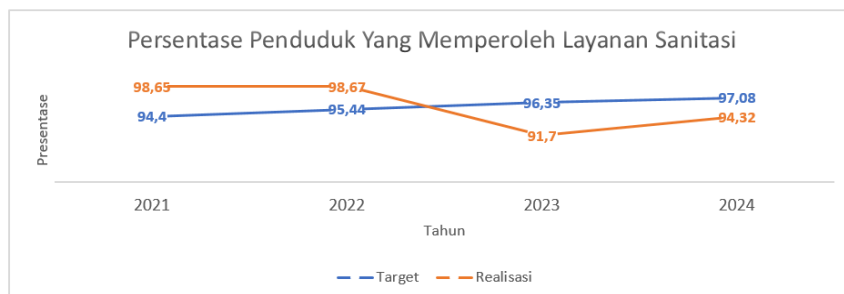
9	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) Pure Puseh, Dusun 6 Kampung Mataram Jaya Kec. Bandar Mataram
10	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) TPA Kanjeng Sunan Muria, Dusun 4 Kampung Bumi Nabung Baru Kec. Bumi Nabung
11	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) RT 02, RW 01 Dusun 1 Kampung Gunung Haji Kec. Pubian
12	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) Masjid Istiqlal Bandar Jaya
13	Pembangunan sumur pompa mesin (SPM) RT 01 Lingkungan 01 Depan TK Cahaya Nurani Gunung Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih



Gambar 5. Pembangunan SPAM dengan Jaringan Perpipaan

✓ Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan atau Aman

Di Tahun 2024 Penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman 376.748 Rumah Tangga (94,32%) dari 399.441 total Rumah Tangga.



Gambar 6. Grafik Capaian IKU 3 Tahun 2021-2024

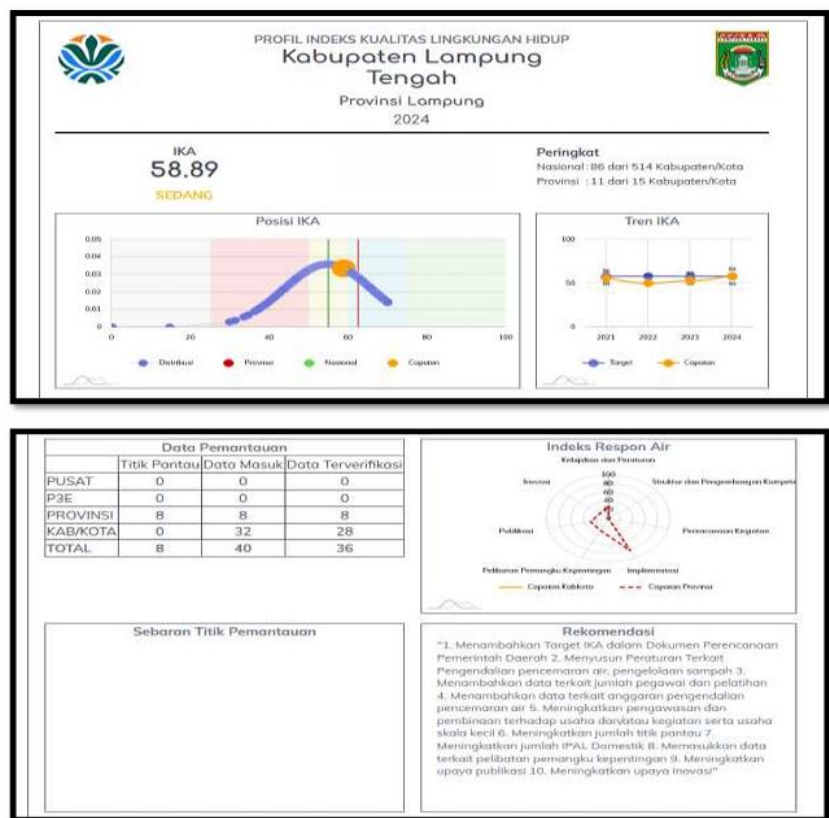
Dalam meningkatkan akses rumah tangga terhadap sistem pengolahan air limbah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya ditunjang oleh Program Pengolahan dan Pengembangan Sistem air Limbah melaksanakan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik berupa pembangunan bilik kamar mandi dan tangki septik individual. Kegiatan tersebut memiliki target 311 rumah tangga dan terealisasi 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan standar yaitu menggunakan kloset leher angsa dan dialirkan ke tangki septik yang kedap air sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan lingkungan masyarakat yang akan berdampak positif bagi kesehatan keluarga disekitar. Kegiatan pembangunan bilik kamar mandi dan tangki septik dilaksanakan pada 6 kampung dengan rincian sebagai berikut ini:

No	Kampung/Kecamatan	Jumlah Unit
1	Bina Karya Baru, Kec. Putra Rumbia	24
2	Bina Karya Sakti, Kec. Putra Rumbia	22
3	Bina Karya Utama, Kec. Putra Rumbia	10
4	Karang Jawa, Kec. Anak Ratu Aji	85
5	Payung Dadi, Kec. Pubian	87
6	Putra Lempuyang, Kec. Way Pengubuan	83
Total		311

✓ Indeks Kualitas Lingkungan Air

Pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target capaian 58,54 poin hanya dapat terealisasi pada 58,89 poin dengan prosentase capaian sebesar 100,59 persen sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan baik.

Berikut ini adalah profil Indeks Kualitas Air Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 berdasarkan analisa



Rekomendasi untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air di Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan Target IKA dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah
2. Menyusun Peraturan Terkait Pengendalian pencemaran air, pengelolaan sampah

3. Menambahkan data terkait jumlah pegawai dan pelatihan
4. Menambahkan data terkait anggaran pengendalian pencemaran air
5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan serta usaha skala kecil
6. Meningkatkan jumlah titik pantau
7. Meningkatkan jumlah IPAL Domestik
8. Memasukkan data terkait pelibatan pemangku kepentingan
9. Meningkatkan upaya publikasi
10. Meningkatkan upaya inovasi

✓ **Indeks Kualitas Udara**

Pencapaian Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target 84,28 poin dapat terealisasi pada 86,24 poin dengan prosentase capaian sebesar 102,33% sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan baik.

Berikut ini adalah profil Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 berdasarkan analisa



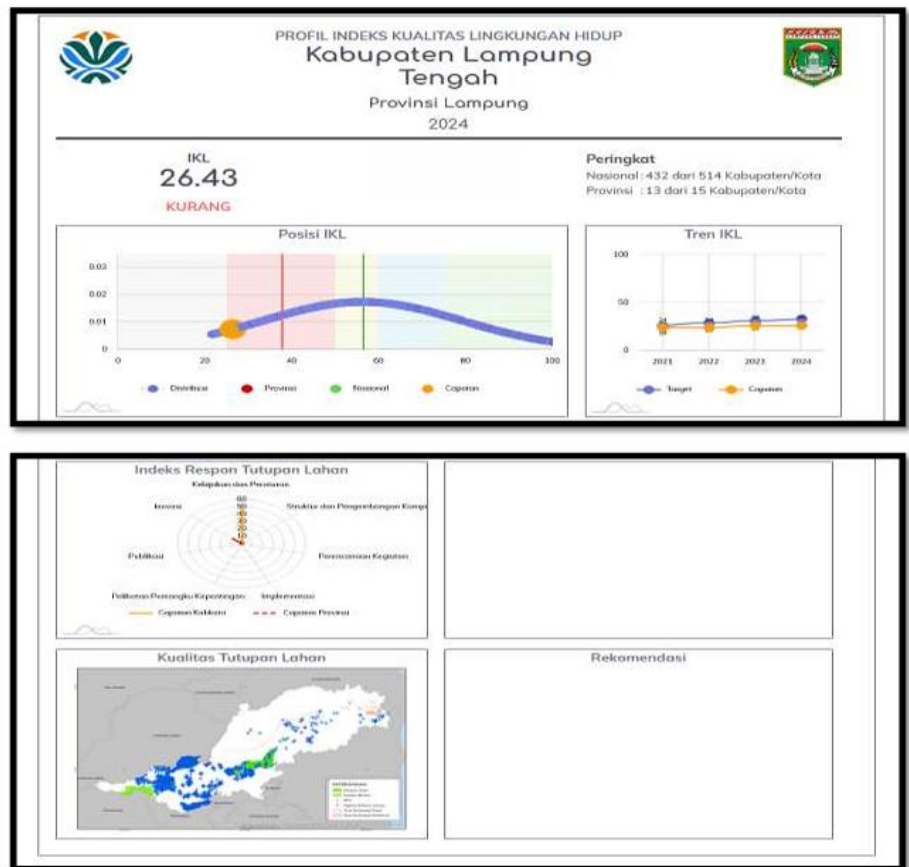
1. Menyusun kebijakan tentang pengendalian pencemaran udara dan menetapkan target IKU kedalam RPJMD;
2. Menambah dan meningkatkan kompetensi SDM di bidang pengendalian pencemaran udara;
3. Menyiapkan anggaran APBD khusus untuk kegiatan pengendalian pencemaran udara;

4. Melakukan pemantauan kualitas udara dengan penggunaan APBD dan meningkatkan pengawasan ke sumber pencemar;
5. Meningkatkan peran serta Masyarakat dan stakeholder dalam program pengendalian pencemaran udara;
6. Meningkatkan inovasi dan publikasi

✓ **Indeks Kualitas Lahan**

Pencapaian Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dengan target capaian 31,47 poin dapat terealisasi pada 26,43 poin dengan prosentase capaian sebesar 83,98% sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan baik.

Berikut ini adalah profil Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 berdasarkan analisa



Gambar 2.3. Rapor Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Lampung Tengah tahun 2024
Sumber : Aplikasi Indeks Respon KLHK 2024

Rekomendasi untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara di Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan tutupan belukar dalam kawasan melalui kolaborasi dengan instansi-instansi terkait;
2. Merumuskan inovasi program penanaman serta mengarahkan program penanaman yang telah ada pada area berfungsi lindung (sempadan sungai dengan kemiringan >25%) untuk mempertahankan serta meningkatkan luas belukar pada fungsi lindung;

3. Mempertahankan upaya pengelolaan RTH dan Tutupan Vegetasi Relevan lainnya yang telah ada;
4. Membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah;
5. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan;
6. Melengkapi data deliniasi/poligon untuk semua peta lokasi RTH dan Tutupan Vegetasi.

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Lahan bertujuan untuk meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang saat ini telah divalidasi oleh DLH Provinsi Lampung;
2. Pelaksanaan Uji Sampling Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Seputih, Way Pengubuan, Way Terusan dan Way Pegadungan pada 14 titik sampel;
3. Pelaksanaan Uji Sampling Kualitas Air pada Danau Tirta Gangga dan Danau Telaga Rejo pada 2 titik sampel;
4. Melaksanakan uji kualitas udara di 4 (empat) titik lokasi di Lampung Tengah sebanyak 2 (dua) kali di lokasi tersebut, yaitu: Kawasan Jalan Raya (Jl. Lintas Sumatera Gunung Sugih), Kawasan Industri (PT Anak TuhaSawit Kp. Bumi Ratu Nuban), Kawasan

Perumahan (Perum Bumi Permai Kec. Terbanggi Besar) dan Kawasan Perkantoran (DLH Komplek Perkantoran Jl. Muchtar Gunung Sugih);

5. Pengujian/analisa parameter kualitas lingkungan untuk jenis sampel air limbah dan air sungai yang berlokasi di UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Lampung Tengah sebanyak 106 sampel terdiri dari 32 sampel air sungai dan 72 sampel air limbah baik inlet maupun outlet beberapa industri dan fasyankes;
6. menyelenggarakan Sosialisasi Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboraturium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan di BBC Hotel Lampung Tengah. Dalam Sosialisasi ini juga turut mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari Seluruh Provinsi Lampung, Fasyankes, serta Pelaku Usaha di Kabupaten Lampung Tengah;
7. Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Masyarakat;
8. kegiatan pengawasan LB3 yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah di 50 (lima puluh) Perusahaan;
9. sosialisasi Pembentukan Organisasi Kedaruratan Limbah B3 yang berlokasi di Aula RS Demang Sepulau Raya di Lampung Tengah;
10. Penyuluhan Masyarakat Sadar Lingkungan sebanyak 7 (tujuh) acara dengan jumlah total peserta yang

mengikuti acara 400 (empat ratus) orang. Bentuk acara Penyuluhan yang dilakukan pada acara:

- Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di TPA Bandarjaya Kec. Terbanggi Besar;
- Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kec. Way Pengubuan;
- Peringatan World Clean Up day di SD N 3 Bandar Agung;
- Peringatan World Clean Up day di SD N 1 Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyai;
- Penyuluhan Sadar Lingkungan di Kp. Nambah Dadi Kec. Seputih Mataram;
- Penyuluhan Sadar Lingkungan di Gunung Madu Kec. Terusan Nunyai;
- Penyuluhan Sadar Lingkungan di Perumahan II Gunung Madu Kec. Terusan Nunyai;
- Sosialisasi Program Kalpataru di Kampung Liman Benawi Kec. Trimurjo;
- Sosialisasi Program Kalpataru di Kelurahan Simbar Waringin Kec. Trimurjo;
- Sosialisasi Program Kalpataru di Kampung Mojopahit Kec. Punggur;
- Sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah (PBLHS) di SD Negeri 1 Bina Karya Utama Kec. Putra Rumbia
- Sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah (PBLHS) di SD Negeri 2 Tanjung Kemala Kec. Pubian;

- Sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah (PBLHS) SMA Negeri 1 Kotagajah Kec. Kotagajah;
 - Sosialisasi dan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Way Pengubuan yaitu Kampung Banjar Ratu dan Kampung Tanjung Ratu Ilir;
 - Sosialisasi dan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Terusan Nunyai yaitu 4 (empat) Kampung Tua yang dilakukan identifikasi yaitu Kampung Gunung Batin Udik, Gunung Batin Baru, Gunung Agung, dan Gunung Batin Ilir.
11. Pendidikan dan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PPCUA dan Petugas K3 di Orchard Hotel Jayakarta Jakarta selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 13 s/d 15 November 2024 yang diikuti oleh 3 (tiga) orang personil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Tengah;
12. melakukan penilaian dan memberikan penghargaan untuk Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Lampung Tengah:
- Penetapan Sekolah Adiwiyata yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 501/KPTS/D.a.VI.11/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, yaitu SD Negeri 2 Tanjung Kemala Kecamatan Pubian (skor 85,03);
 - Penetapan Penerima Penghargaan Kalpataru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati

Lampung Tengah Nomor : 502/KPTS/D.a.VI.11 /2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kalpataru Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, yaitu Bank Sampah Fajar Asri SD N 2 Tanjung Kemala Kecamatan Pubian.



13. Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berlokasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah;
14. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, dengan melakukan:
 - Pemeliharaan bok kontainer sebanyak 4 unit;
 - Penggunaan aplikasi SIPSN dengan alamat <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda>
 - Pemenuhan Operasional kantor untuk UPTD Kebersihan dan Pengelolaan sampah

- ✓ **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang** Tahun 2024 sebesar 77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan tata ruang sampai tahun 2024. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Lampung Tengah terdapat Forum Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang bertujuan untuk melaksanakan koordinasi penataan ruang di Daerah.
- ✓ Pada Misi III rata-rata capaian sebesar 101,54%, 7 (tujuh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada misi III dalam kategori sangat baik.
- ✓ **Score PPH** Tahun 2024 realisasi sebesar 93,7%, dari target sebesar 88,2%.

No	Kelompok Pangan	SKOR AKE ¹⁾	% Kalori ²⁾	SKOR PPH Kab Lamteng	Skor PPH Nasional
1	Padi-padian	30,8	44,8	25	58,3
2	Umbi-umbian	1,7	45,1	1,5	2,8
3	Pangan Hewani	18,5	1,7	21,8	11,5
4	Minyak dan Lemak	7,4	6,3	5,0	11,2
5	Buah / Biji Berminyak	1,0	0,0	1	1,2
6	Kacang-kacangan	5,9	0,3	7,7	3,1
7	Gula	2,2	0,8	1,7	3,8
8	Sayur dan Buah	28,3	1,0	30	5,4
9	Lain-lain	0,0	0,0	0	2,6
T O T A L		95,7	100,0	93,7	92,9

Dibawah ini perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 s.d. 2024

No	Kelompok Pangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PPH Nasional
1	Padi – padian	25,0	25,0	25	25	25	25	25
2	Umbi – umbian	2,5	2,5	1,7	2,5	2,5	1,5	2,5
3	Pangan Hewani	16,7	18,4	18,5	20	20,1	21,8	24
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5	5	5	5,0	5
5	Buah /BijiBerminyak	0	0	1	1	1	1	1
6	Kacang – kacang	3,8	3,3	5,9	0,3	3,6	7,7	10
7	Gula	2,4	2,1	2,2	2,5	2,5	1,7	2.5
8	Sayur dan Buah	29,7	26,3	28,3	30	28,5	30	30
9	Lain –lain	0,0	0,0	0,0	0	0	0	00
	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	85,2	82,7	87,5	86,3	88,2	93,7	100

Perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) Tahun 2019-2024 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 mencapai 88,2 dan pada tahun 2024 mencapai 93,7 terdapat beberapa komoditas pangan yang sudah memenuhi PPH Nasional seperti padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, kacang-kacangan serta sayur dan buah ,sedangkan untuk komoditi yang lain belum mencapai PPH yang ditetapkan Nasional. Adapun Pola Pangan Harapan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan di tahun 2024.

Untuk meningkatkan score PPH Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan melakukan Langkah-langkah:

1. Pembangunan Embung Pertanian yang berlokasi di Kecamatan Terusan Nunyai;
2. pembangunan Jalan Usaha Tani di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, Kampung Bangunsari Kecamatan Bekri, Kampung

Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya, Kampung Binjai Ngagung Kecamatan Bekri, Kampung Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung, Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha, Kampung Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman, Kampung Kedatuan Kecamatan Bekri, Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha, ;

3. Pembangunan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Trimurjo;
4. Pembangunan Dam Parit Kampung Purworejo Kecamatan Padang Ratu
5. Pembangunan, rehabilitasi pembangunan prasarana pertanian yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dari masyarakat seperti Jaringan Irigasi Air Tanah di 13 Lokasi;
6. Pembinaan pelatihan tematik kepada Kecamatan dan Bantuan paket data internet yang berlokasi di 28 Kecamatan;
7. peningkatan kapasitas kelembagaan petani seperti gapoktan dan kelompok wanita tani (KWT) dengan melakukan pembinaan;
8. Penyelenggaraan dan pembinaan sekolah lapang kepada petani dan masyarakat tentang padi sawah, jagung, tepung moca, dan lumbung pangan masyarakat;



Prestasi yang diperoleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu:

- 1) Penghargaan Atas Dedikasi Dalam Melaksanakan Kegiatan Gerakan Edukasi Dan Pemberian Pangan Bergizi Untuk Siswa (Genius) Tahun 2024 Dengan Predikat Baik
- 2) Penghargaan Terbaik Ke-2 Atas Keberhasilan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral Se-Provinsi Lampung Dengan Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sebesar 2,88 Predikat Baik.
- 3) Juara I Sebagai Petani Tanaman Pangan Berprestasi Tingkat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Atas Nama Sadikin
- 4) Juara II Sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani (Kep) Berprestasi Tingkat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Atas Nama Arta Tani Mandiri.
- 5) Juara I Sebagai Petani Tanaman Hortikultura Berprestasi Tingkat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Atas Nama Ahmad Muthobiin.

Selain itu, dalam pelaksanaan nya Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan didukung oleh adanya kelompok tani yang berjumlah 5.183, jumlah P3A berjumlah 331, GP3A 24, UPJA 121 dan jumlah penyuluh pertanian 262 orang

- ✓ **Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB**

tahun 2024 sebesar 31,57 persen. Sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama dalam pengembangan ekonomi rakyat di daerah. Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dianggap tidak penting dalam perekonomian daerah. Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk pedesaan, pemasok pangan nasional, penggerak ekspor non migas, pemasok bahan baku industri dan sektor-sektor lainnya. Mengingat begitu pentingnya Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi daerah, maka kemajuan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sangat diperlukan terutama untuk menjamin agar penyediaan pangan bagi penduduk akan tetap terjamin. Kesanggupan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk menyediakan pangan yang cukup bukan saja menyebabkan terhindarnya bahaya kelaparan, akan tetapi dapat pula menunjang perkembangan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah harus menempatkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai elemen dominan

dalam kebijakan-kebijakannya karena sektor itu merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki daerah.

- ✓ **Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB** tahun 2024 sebesar 13,05 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2023 (12,52 persen) terjadi kenaikan sebesar 0,53 persen. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi sector perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam upaya peningkatan sektor perdagangan terhadap PDRB, Kabupaten Lampung Tengah meningkatkan ekspor barang dan jasa.
- ✓ **Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Dalam PDRB** tahun 2024 sebesar 22,99 persen, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 (21,65 persen) terjadi kenaikan sebesar 1,34 persen.

Kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

- ▶ Adanya kebijakan pemulihan ekonomi pemerintah. Kebijakan strategis pemerintah seperti insentif fiskal dan non fiskal membantu mendongkrak produktifitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Strategi fiskal berupa peningkatan investasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan SDM pelaku industri dengan melakukan pelatihan dan pendidikan.

Kebijakan non fiskal berupa penetapan harga eceran (HET) yang bertujuan untuk melindungi stabilitas ekonomi.

Adanya penerapan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) membantu para IKM/UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena fokus ke produk lokal dan wajib dilaksanakan.

► **Integrasi Teknologi.**

Penggunaan Teknologi di sektor industri dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan produktifitas.

Upaya peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non migas didukung oleh program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri dengan pemberian bantuan alat / mesin produksi olahan pangan dan kerajinan bagi IKM binaan Dinas Perindustrian sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi , kualitas produk dan juga mengurangi biaya operasional sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah.

- ✓ **Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi** Di Tahun 2024 sebesar 10,27 meningkat sedikit dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 4,98 namun masih jauh realisasi nya jika dibandingkan di

tahun 2022 sebesar 41,69. Untuk iklim usahanya sendiri dalam kondisi yang kondusif dan ada pertumbuhan, hanya saja karena di pengumpulan data. Ada pembaharuan data koperasi pada aplikasi ODS yg menjadi acuan dalam pelaporan kinerja. Data koperasi yang sebelumnya berstatus aktif dan ada data volume usahanya di tahun lalu, tahun ini banyak yg ditertibkan statusnya menjadi tidak aktif dan data volume usahanya dinolkan.

Untuk meningkatkan volume usaha koperasi, Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan melakukan Langkah-langkah:

1. Monev Pemutakhiran Data Koperasi pada aplikasi ODS serta Pembinaan Organisasi dan Peningkatan Koperasi yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah
2. Pembinaan pengembangan produksi usaha mikro yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah.
3. berupa pembinaan temu usaha mikro yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah.
4. berupa pembinaan penguatan permodalan yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah.
5. fasilitasi pembinaan produktivitas dan pemasaran yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Koperasi, Pelatihan Pembuatan Kerajinan Khas Lampung, dan Pelatihan Pengolahan Produk Usaha

Mikro yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah.

7. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah.
8. Pembinaan Perangkat Organisasi dan Rapat Anggota Tahunan serta Koordinasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah.

✓ **Rasio Kemandirian Fiskal**

Tahun 2024 rasio kemandirian fiskal sebesar 8,92%. Dengan total pendapatan di tahun 2024 sebesar Rp. 2.690.534.151.215,60,- dan jumlah PAD tahun 2024 sebesar Rp.239.956.223.501,60,-. Dari Nilai PAD hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam membiayai belanja daerah 8,92%.

Upaya yang dilakukan Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan PAD yaitu:

1. Pemberdayaan pajak dan retribusi

- Memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan tarif pajak dan retribusi sesuai kondisi ekonomi lokal
- Memberdayakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

2. Menggandeng investor

- Menggandeng investor dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, seperti

pembangunan rumah sakit, hotel, dan tempat rekreasi

- Memanfaatkan potensi-potensi daerah yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah daerah

3. Pengawasan

- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dicanangkan untuk meningkatkan PAD daerah
- Melakukan efisiensi anggaran dan biaya operasional pemerintah daerah

✓ **Persentase Peningkatan Investasi** tahun 2024 sebesar 30,42%. Terdapat peningkatan realisasi investasi di tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 39.597.715.358.326,- jika dibandingkan di tahun 2022 sebesar Rp. 30.362.319.958.982,-. Untuk rincian nilai investasi dari tahun 2021-2024 terdapat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
I.	Jumlah Perusahaan	210	292	391	17.057
	1. PMA	32	40	41	53
	2. PMDN	178	252	350	17.004
II.	Jumlah Tenaga Kerja	36.371	64.755	68.264	164.228
	1. Indonesia	36.270	64.654	68.163	116.399
	2. Asing	101	101	101	47.829
III.	Nilai Investasi	14.204.492.171.158	25.944.131.542.055	30.362.319.958.982	39.597.715.358.326
	1. PMA	3.162.088.489.000	8.736.832.702.619	10.134.148.214.155	14.743.344.501.927
	2. PMDN	11.042.403.682.158	17.207.298.839.436	20.228.171.744.827	24.854.370.856.399

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk lebih meningkatkan investasi DPMPSTSP melakukan Langkah-langkah kegiatan, yaitu:

- kegiatan penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Dalam kegiatan ini melaksanakan Kegiatan PAMERAN APKASI OTONOMI EXPO (AOE) 2024 yang berlokasi di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, yang bertujuan untuk mengenalkan potensi unggulan yang ada di Lampung Tengah di bidang ekonomi kreatif, pariwisata serta mengenalkan produk-produk unggulan UMKM dan menjalin jejaring bisnis dengan para *buyer* dan investor baik dalam maupun luar negeri

Lampung Tengah Mendapatkan Penghargaan pada Kategori Stand Paling Inovatif serta Stand Paling Atraktif dan atas kedua penghargaan serta di tambah dengan penghargaan Fashion Show Wastra Nusantara yang meraih Best Performance Kabupaten Lampung Tengah meraih **JUARA UMUM** yang sebelumnya didapatkan oleh Kabupaten Mimika pada Apkasi Otonomi Expo tahun 2023 dan Kabupaten Gowa meraihnya pada tahun 2022.



- kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Didukung oleh adanya Mall Pelayanan Publik yang mempunyai Layanan, yaitu:

1. Layanan internal 12 terdiri dari

DPMPTSP, DISDUKCAPIL, DPKPPCK, BAPENDA, Dinkes, Dinsos, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdag, Dinas Pendddkan, Dinas Ling Hidup, Dinas Perpustakaan, dan Bagian PBJ

2. Layanan External 17 terdiri dari

Imigrasi, Kemenag, Pengadilan Agama. Polres, Kejaksaan, BPN, BPJS Kes, BPJS Ketenagakerjaan, Dirjen Pajak, BPOM, Kemenkumham, BNK, BP2MI, Samsat, PT Taspen, Bank Lampung, Bank Rajasa, PT Pos.

Selain hal tersebut juga dapat dilihat dari lamanya proses pengurusan perijinan dimana pada tahun 2024 rata-rata lama proses perizinan selama **1 hari kerja**. Sebagai gambaran pelayanan perizinan yang dilaksanakan selama tahun 2024 berjumlah **41.325 izin**, atau mengalami peningkatan sebesar **56,24 persen** dibanding tahun 2023.

Hal ini disebabkan Pemberian Izin usaha secara gratis secara online dengan turun kelapangan dalam kegiatan Bunga Kampung.

Atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang Penanaman Modal ditunjukkan pula oleh pemberian

penghargaan di bidang Penanaman Modal selama tahun 2023-2024; Audit Kepatuhan Ombudsman tahun 2024, penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dengan Nilai 92,29 Predikat Zona Hijau (Kualitas Tertinggi)



- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk melakukan Monitoring, dibentuklah Tim Fasilitator Penanaman Modal Perizinan Berusaha dan Non Perizinan turun langsung ke Lokasi Usaha Tahun 2024 dengan Nomor SK Bupati 345/KPTS/D.a.VI.17/2024

Di tahun 2024, monitoring dilakukan terhadap 32 Kegiatan Usaha, dengan Lokasi

- Kecamatan Terbanggi Besar : CV Dwi Karya Unggul, Arsade Inti Gasindo, Indoprima Beef dan Gudang Asia.

- Kecamatan gunung Sugih: Manuppak Abadi, Sinar Bambu Kencana dan Gunung mas Putra Kencana.
- Kecamatan Rumbia: CV Gunung Intan, Unggul Mekar Sari, dan Sinar makmur Sejahtera.
- Kecamatan Pubian : Kriya swarna Pubian.
- Kecamatan Bumi Ratu Nuban : Mukti Panel Industri, CV Gunung Sugih dan PT Agung Jaya Raya Indonesia.
- Kecamatan Bandar Mataram : Sinar Pematang mulia, Hamparan Bumi Mas Abadi, Panca Agro Lestari, CV Gunung Intan, Dharma Jaya, Cv Bangun Jaya, Srikencono, Tunas Jaya Lautan, Sinar Makmur Sejahtera dan Gemuruh Semesta.
- Kecamatan Way Pengubuan : Minngook, Indolatek dan Tedco Agri Makmur.
- Kecamatan Trimurjo: Surya Tsabat Mandiri, PP Subur Jaya dan Indosari Lombok Mas.
- Kecamatan Bekri : Sentosa Agrindo dan KASA

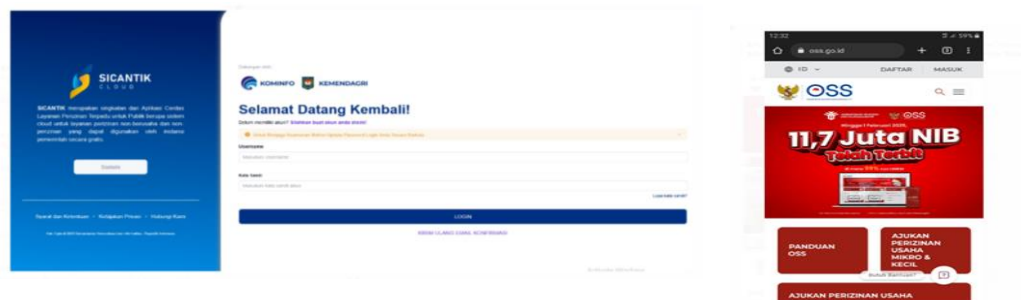
Setelah dilakukan Monitoring, Tim akan menemukan Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Kegiatan Usaha. Dari Permasalahan tersebut maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dilakukan Bimtek kepada Pelaku Usaha di Hotel BBC Bandar Jaya Tanggal 26 dan 27 Juni 2024 yang diikuti oleh 500 Orang, Bimtek bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku usaha dalam Penyusunan

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Onlinenya melalui Aplikasi OSS



- kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka Pemenuhan Permintaan Data dan Informasi Penanaman Modal dapat melalui Aplikasi OSS dan Si-Cantik Cloud yang dikelola oleh Bidang Penanaman Modal, Laporan data dan Informasi Penanaman Modal tersebut dilakukan tiap Bulan, yang nanti data tersebut siap digunakan dalam rangka melihat perkembangan investasi Kabupaten baik Investor Dalam Negeri maupun Asing.



- ✓ **Indeks Desa Membangun** tahun 2024 sebesar 0, 749 dengan kategori desa maju. Mulai tahun 2021, IDM Kabupaten Lampung Tengah 2021 berpredikat “**MAJU**”, dan berhasil mempertahankan posisi diatas rata-rata IDM Provinsi Lampung, serta mulai mewujudkan Desa Mandiri sebanyak 3 Kampung. Tahun 2024, telah berhasil mewujudkan Desa Mandiri sebanyak 15,95% atau 48 Kampung dan 62,79% Desa Maju atau 198 Kampung dari total 301 Kampung.

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta

Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Di Dinas PMK ada beberapa program yang sangat mempengaruhi perubahan Status Kampung menjadi Lebih baik.

Keberhasilan Indek Desa Membangu Kabupaten Lampung Tengah juga dukungan penuh dari masyarakat lokal dengan menudukung dan memfasilitasi masyarakat kampung untuk mengembangkan Ide-ide kreatif serta mengelola sumber daya lokal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Kabupaten Lampung Tengah mendukung dengan Program-program kegiatan diantaranya adalah :

➤ Kegiatan fasilitas Peyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan yang bertujuan untuk membantu dan memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam mengelola Pemerintahan Kampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 melakukan kegiatan pembinaan yang dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Kampung yaitu Kasi Pemerintahan Kampung sebanyak 301 peserta. Dari hasil kegiatan ini banyak aparatur kampung yang semakin paham bagaimana mengelola pemerintahan kampung dalam hal membantu kepala kampung dalam melaksanakan tugas manajemen tata praja pemerintah, Menyusun rancangan regulasi atau kebijakan pemerintah kampung, Membina masalah pertanahan, Menata dan mengelola wilayah kampung dan masih banyak lagi dari hasil ini maka kampung mempunyai tata praja pemerintahan yang baik,, terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat, terwujudnya perlindungan masyarakat, terwujudnya administrasi pemerintahan yang baik,

- Kegiatan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah melakukan monitoring dan evaluasi keuangan desa untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peruntukannya Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa. Tim Monitoring Dinas PMK turun kelapangan

untuk mengetahui perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kampung pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan. Setelah melakukan monitoring tim akan turun lagi kelapang untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. Dampak dari kegiatan Monitoring dan evaluasi (monev) dana desa dapat berdampak positif terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini karena monev dana desa dapat memastikan dana desa digunakan secara optimal dan tepat sasaran

- Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan adalah kegiatan penilaian kinerja pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Lomba Desa merupakan salah satu tahap evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Kegiatan ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan perkembangan desa. Evaluasi perkembangan desa dapat mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat karena Pemerintah pusat berharap dana desa yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

(RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan jiKarang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Hukum Adat dan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun ini melakukan Kegiatan untuk membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai mitra kerja pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam hal, yaitu:

- Melakukan pemberdayaan masyarakat
- Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- Meningkatkan pelayanan masyarakat
- Mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- Ikut serta dalam menyusun rencana, melaksanakan hingga melakukan evaluasi pembangunan desa
- Menjalankan gagasan yang diterima, berpartisipasi dalam kegiatan desa seperti gotong royong

➤ Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,

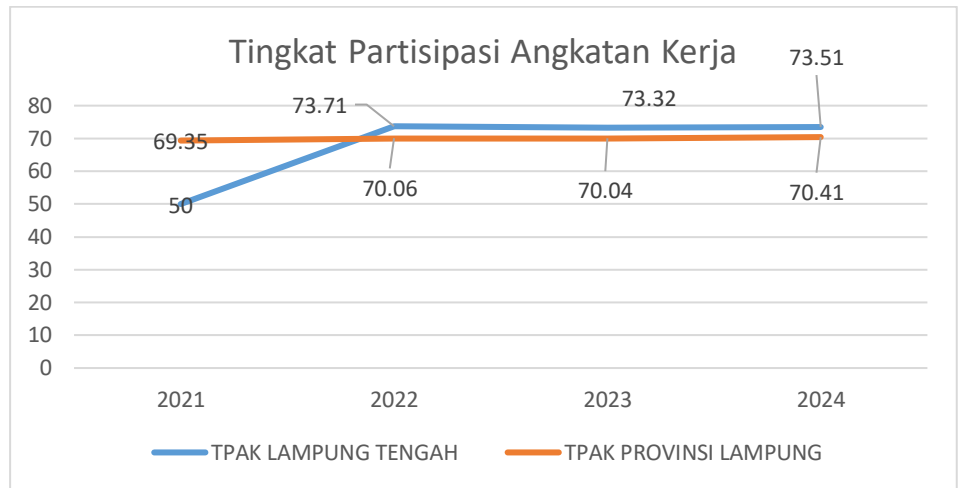
memberikan nilai tambah produk, perbaikan mutu, dan mendorong usaha ekonomi produktif yang efisien dan efektif. Dengan kemampuan masyarakat yang memiliki keahlian dalam hal menciptakan sesuatu produk yang hasilnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga inovasi ini bisa dikembangkan di kampung yang akhirnya bisa merekrut tenaga untuk mengurangi pengangguran di kampung dan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di kampung.

✓ **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tahun 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,51 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 73,32%

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Bukan Angkatan Kerja <i>Not Economically Active</i>	Jumlah Total	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) <i>Labour Force Participation Rate (%)</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
0	123.036	441.874	72,16
1	118.108	372.169	68,26
2	43.384	279.434	84,47
3	18.850	70.632	73,31
Jumlah/Total	310.116	1.170.847	73,51

Kinerja penurunan TPT Lampung Tengah lebih baik dari Provinsi Lampung.



Untuk meningkatkan partisipasi Angkatan kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan Langkah-langkah:

1. Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online di web Kabupaten Lampung Tengah;
2. Job Fair/Bursa Kerja;
3. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI);
4. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan;
5. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
6. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
7. Konsultasi pada Perusahaan Kecil;

✓ **Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) Desil 1**

Tahun	Jumlah DTKS
2022	68.780 Orang
2023	58.265 Orang
2024	47.290 Orang

Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan jumlah DTKS

Beberapa penyebab terjadinya penurunan :

- 1) Adanya kebijakan dimana KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tapi sudah bekerja di perusahaan atau salah satu anggota keluarganya bekerja di perusahaan dan upahnya di atas UMP atau UMR maka kepesertaannya sebagai KPM PKH akan dinonaktifkan.
- 2) Graduasi mandiri, yaitu keluarnya KPM PKH dari kepesertaan secara mandiri.
- 3) hasil verifikasi dan validasi kampung dimana ditemukan KPM PKH yang sudah tidak layak untuk menerima bantuan, sehingga dinonaktifkan.

Selain itu Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 penduduk miskin sebesar 10,65% dan menurun sebesar 0,28% di Tahun 2024 menjadi 10,37%.

Tabel 4.4.1
Table

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Tengah, 2016–2024
Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Lampung Tengah Regency, 2016–2024

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	373.980	162,38	12,90
2017	385.132	160,12	12,62
2018	394.338	153,84	12,03
2020	436.777	152,28	11,82
2021	450.232	155,77	11,99
2022	474.429	143,34	10,96
2023	503.645	140,29	10,65
2024	526.313	137,41	10,37

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

4. Misi IV rata-rata capaian sebesar 100% terdiri dari (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja, jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada misi IV dalam kategori sangat baik.

✓ **Jumlah kejadian konflik sosial**

Tahun 2024 tidak terdapat kejadian konflik sosial di masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat Lampung Tengah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah Pembangunan Makodim Lampung Tengah di Terbanggi Besar dan Mako Kompi Brimob Polda Lampung di Anak Tuha serta memiliki personil sebanyak 597 anggota Satpol PP, 9.641 anggota Linmas dan 8.948 unit Poskamling dalam upaya Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat.

Angka kriminalitas semakin turun dari tahun 2020 sebesar 4,25 kasus menjadi 2,87 kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di tahun 2022 dan tidak ada kasus konflik social sampai dengan tahun 2024.



Selain itu Untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial, Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan upaya dengan:

1. Pembinaan/Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan;
2. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik melalui Pembinaan/Sosialisasi yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan;
3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial melalui pembinaan dan sosialisasi

yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan;

4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;

5. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, salah satunya dengan melakukan sosialisasi Anti Narkoba kepada masyarakat, pemuda dan pelajar.

✓ **Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda**

Penurunan pelanggaran Perda Tahun 2024 sebanyak 10 persen. Dalam penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja membuat suatu kegiatan inovasi yang bekerja sama dengan Bagian Hukum, Bapenda dan DPMPTSP, yaitu “Peningkatan Peran PPNS Sebagai Upaya Penegakan Perundang – Undangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah”. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2020. Dari kegiatan ini selain berdampak dalam penegakan Perda di Kabupaten Lampung Tengah, tetapi juga berdampak dalam peningkatan PAD di Kabupaten Lampung Tengah. Selain kegiatan inovasi ini Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan Kegiatan Pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan

Pengawalan; Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum; Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM sat.Pol.PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 28 Kecamatan.

✓ **Indeks Resiko Bencana** Tahun 2024 masuk dalam kategori sedang. Dari 15 Kabupaten Kota yang masuk dalam kategori sedang adalah Tanggamus, Pringsewu, Waykanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah dan Kota Metro, sedangkan Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulangbawang, dan Bandar Lampung berisiko tinggi. Karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

5. Misi V rata-rata capaian sebesar 104,21% terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja, jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada misi V dalam kategori sangat baik.

✓ **Opini BPK** atas laporan keuangan tahun 2023 WTP, dengan mendapatkan opini tersebut artinya Laporan

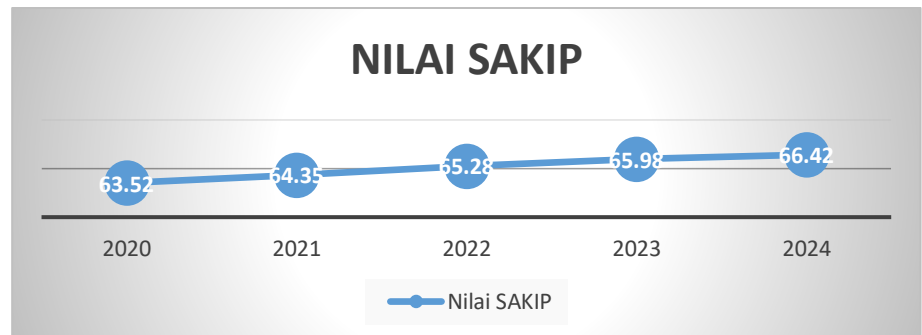
Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

- ✓ **Indeks SPBE** tahun 2024 2,68 (Kategori Baik) sama jika dibandingkan tahun 2023 yaitu 2,68 (Kategori Baik). Untuk meningkatkan indeks SPBE Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik melakukan upaya: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yaitu terkelolanya data yang ada di website Lampung Tengah sehingga dapat diakses masyarakat dengan mudah; Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pengembangan e-government untuk menunjang sistem pemerintahan yang terbuka (open goverment) dan pelayanan publik secara online yang andal, terpercaya serta terjangkau; Meningkatkan keamanan informasi melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM persandian. Selain itu juga Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Bagian Organisasi dan Bappeda bersama-sama mengupayakan pelaksanaan penyelarasan arsitektur SPBE Nasional dengan arsitektur SPBE Daerah dengan menggunakan aplikasi versi demo dimana nantinya setelah selesai proses input secara mandiri oleh Pemerintah Daerah melalui

tim koordinasi SPBE maka akan dilakukan migrasi data ke server Aplikasi SIA SPBE V2.

✓ **Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah** Tahun 2024 mendapatkan nilai 66,42 dengan kategori Baik (B).

Berikut trend nilai SAKIP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024



Untuk meningkatkan nilai AKIP, Bagian Organisasi, Bappeda dan Inspektorat melakukan upaya-upaya, yaitu:

1. Mulai menjalankan sistem aplikasi AKIP kabupaten agar lebih mudah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
2. Terus berupaya melakukan perbaikan dokumen AKIP, dengan melakukan pendampingan ke Perangkat Daerah;
3. Bappeda melakukan reviu terhadap Renstra dan RKPD Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan kemampuan Penanggung jawab AKIP di setiap Perangkat Daerah dengan dilakukannya bimtek penyusunan LAKIP;

5. Telah dilakukan penyempurnaan laporan kinerja disesuaikan dengan Permenpan 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui desk Laporan Kinerja, yang hasil nya sudah di upload pada esr.menpan.go.id
 6. Telah dilakukan Reviu kinerja oleh Inspektorat yang hasil nya sudah di upload pada esr.menpan.go.id
 7. Telah memanfaatkan IT dalam manajemen kinerja dengan menggunakan SIPD mulai dari Perencanaan dan penganggaran serta pelaporan keuangan dengan Simda Keuangan.
- ✓ **Indeks Inovasi Daerah** tahun 2024 dalam kategori inovatif. Untuk meningkatkan indeks inovasi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif yaitu lomba yang diadakan untuk menjaring masyarakat berbakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah antara lain Lomba Inovasi Daerah dan Lomba Teknologi Tepat Guna. Lomba inovasi daerah bertujuan untuk mendorong angka indeks inovasi daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Lomba Teknologi Tepat Guna bertujuan menjaring mahasiswa dan masyarakat umum berpotensi dan memberikan apresiasi atas keilmuannya

✓ **Indeks Profesionalitas ASN** tahun 2024 sebesar 74,89 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 61,79, Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Untuk menaikkan nilai Indeks Profesionalitas ASN, BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah terus melakukan pembenahan, antara lain:

- ✓ Peningkatan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan (yang dilakukan saat ini adalah melalui sistem daring)
- ✓ Menyempurnakan Peta Jabatan dan Rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (lima) tahun berdasarkan Anjab dan ABK sesuai dengan program prioritas Pembangunan dan/atau potensi daerah.
- ✓ Menyusun Perencanaan Pengadaan ASN untuk tahun berjalan berdasarkan Anjab ABK sesuai dengan peta potensi daerah dan prioritas pembangunan.
- ✓ Melaksanakan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang terpetakan profil kompetensinya.
- ✓ Menyempurnakan kebijakan internal terkait Pola Karier sesuai dengan manajemen talenta dan rencana suksesi dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021

- ✓ Melengkapi kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana Strategis.
- ✓ Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian kepada seluruh ASN di lingkungan instansi pemerintah.
- ✓ Membangun Sistem Informasi pembinaan/ pengembangan karir yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Penilaian Kinerja dan disiplin
- ✓ **Indeks Kepuasan Masyarakat** atas pelayanan publik Tahun 2024 sebesar 86,36 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 86,33. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selalu melakukan perbaikan guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan salah satunya dengan meningkatkan pelayanan mall pelayanan publik, dengan menambah jumlah layanan yang ada di mall, selain itu terus melakukan monitoring dan evaluasi ke perangkat daerah yang memberikan layanan kepada masyarakat.

Dalam penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kabupaten Lampung Tengah berada pada urutan 49 dari 380 Kabupaten seluruh Indonesia yang dilakukan penilaian oleh KemenpanRB, dan berada di nomor 3 untuk di Provinsi Lampung, berikut hasil penilaiannya:

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Kabupaten Lampung Tengah 2024

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 659 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

A. PROVINSI

No	Daftar Provinsi	IPP			IPP Provinsi	Kategori	Keterangan
		Dinas Sosial	RSUD	Samsat/Bappenda			
1	Provinsi Lampung	4,04	4,51	4,26	4,27	A-	Urutan ke 12 dari 33 Provinsi

B. KOTA

No	Daftar Kota	IPP			IPP Kota	Kategori	Keterangan
		Dinas Sosial	RSUD	Disdukcapil			
1	Kota Metro	4,32	4,70	4,79	4,60	A	Urutan ke 13 dari 98 Kota
2	Kota Bandar Lampung	3,90	4,47	4,61	4,33	A-	Urutan ke 44 dari 98 Kota

C. KABUPATEN

No	Daftar Kabupaten	IPP			IPP Kabupaten	Kategori	Keterangan
		Dinas Sosial	RSUD	Disdukcapil			
1	Kabupaten Tulang Bawang	4,38	4,55	4,56	4,50	A-	Urutan ke 40 dari 380 Kabupaten
2	Kabupaten Lampung Tengah	4,35	4,64	4,40	4,46	A-	Urutan ke 49 dari 380 Kabupaten
3	Kabupaten Pringsewu	4,68	4,14	4,55	4,46	A-	Urutan ke 53 dari 380 Kabupaten
4	Kabupaten Lampung Utara	4,33	4,47	4,47	4,42	A-	Urutan ke 61 dari 380 Kabupaten
5	Kabupaten Way Kanan	4,08	4,66	4,38	4,37	A-	Urutan ke 69 dari 380 Kabupaten
6	Kabupaten Pesawaran	4,05	4,47	4,43	4,32	A-	Urutan ke 87 dari 380 Kabupaten
7	Kabupaten Tanggamus	4,32	4,15	4,35	4,27	A-	Urutan ke 101 dari 380 Kabupaten
8	Kabupaten Mesuji	4,06	4,09	4,10	4,08	A-	Urutan ke 151 dari 380 Kabupaten
9	Kabupaten Lampung Timur	3,72	3,96	4,29	3,99	B	Urutan ke 169 dari 380 Kabupaten
10	Kabupaten Lampung Barat	3,78	4,10	3,83	3,90	B	Urutan ke 180 dari 380 Kabupaten
11	Kabupaten Lampung Selatan	3,89	4,06	4,22	3,89	B	Urutan ke 184 dari 380 Kabupaten
12	Kabupaten Pesisir Barat	3,95	2,96	4,08	3,66	B	Urutan ke 221 dari 380 Kabupaten
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,89	3,09	4,29	3,42	B-	Urutan ke 255 dari 380 Kabupaten

Untuk penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Tahun 2024, Kabupaten Lampung Tengah berada pada zona hijau dengan nilai 92,25 Kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi.



**REKAPITULASI HASIL
PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Lampung Tengah
Periode Penilaian : Mei - September 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Puskesmas Poncowati	21.26	30.82	23.27	21.54	96.89
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.68	31.03	22.65	20.97	93.33
3	Puskesmas Bandar Jaya	20.40	30.82	23.19	18.01	92.42
4	Dinas Sosial	18.70	30.31	23.27	20.04	92.31
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.69	30.31	23.27	19.03	92.29
6	Dinas Pendidikan	18.34	29.48	23.07	15.38	86.27
Nilai Akhir dan Zona		92.25				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Keterangan :

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia

3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Kinerja Yang Telah Dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left\{ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right\}$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 2.452.465.973.515,- sementara target biaya untuk semua

program Rp. 2.646.700.980.556,- yaitu Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 7,34%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya, namun bila dilihat pada level kegiatan Nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap capaian misi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Per Sasaran Strategis Tahun 2024

MISI	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi I : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	61,54	9.188.268.026	87,35
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	97,59	174.378.713.219	97,35

	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	100,14	132.173.218.923	75,94
	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	89,14	8.035.241.492	76,60
Misi II: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	88,67	119.375.535.753	96
	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	120,69	1.867.566.748	96,72
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	95,68	9.528.578.945,25	88,82
	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	103,91	37.277.531.748	93,16
	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	95,58	2.389.417.912	94,37
	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	93,90	347.735.538	66,56
Misi III: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat	99,32	18.562.021.230	90,62

Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan	berbasis ekonomi kerakyatan			
	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	93,36	858.641.818	94,66
	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	106,19	3.268.416.735	89,33
	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	93,13	1.044.387.200	91,36
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	99,07	2.666.696.067	94,62
	Menurunnya angka pengangguran	98,89	506.605.986	87,24
	Meningkatnya penanganan kemiskinan	117,69	1.574.109.723	86,44
Misi IV: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	100	60.539.392.844	98,95
	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	100	575.790.160	31,42

	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	100	598.846.105	85,03
Misi V: Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	101,8	1.830.855.848.561	93,61
	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	120,79	1.529.219.205	80,10
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	97,24	35.324.189.571	89,26

Berdasarkan analisis dari tabel di atas ada indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi, namun pencapaian target untuk indikator sasaran dapat terealisasi sepenuhnya bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Hanya saja pada misi I terdapat indikator yang capaian kinerjanya jauh dari target yang ditentukan, yaitu: pada indikator Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional hanya memperoleh capaian 24,24 persen. Hal ini merupakan tantangan bagi Kabupaten dalam meningkatkan prestasi olahraga dalam event Nasional, salah satu upaya yang telah dilakukan adalah Penyediaan sarana dan prasarana olahraga berupa Pembangunan Kolam Renang di area Lampung Tengah Sport Centre.

Tabel 3.14

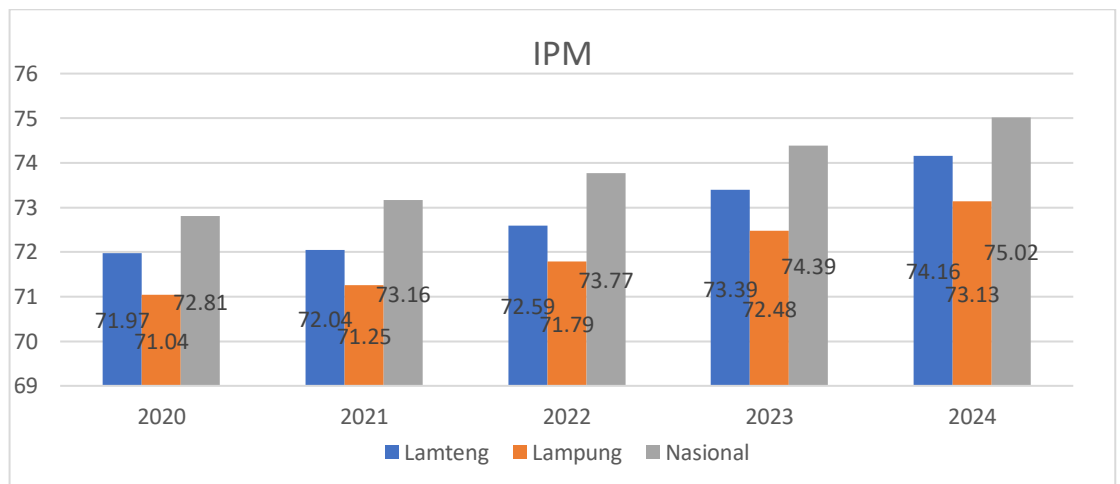
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2024**

MISI	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi I : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	9	88,27	86,53	1,74
Misi II: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa	13	100,82	94,84	5,98
Misi III: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan	10	101,06	90,67	10,39
Misi IV: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah	3	100	96,86	3,14
Misi V: Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan	6	104,21	93,51	10,7

3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja dari semua sasaran strategis ini sebanyak 125 program dan 43 indikator.

1. Pada Misi I terdapat 22 program dan 9 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 88,27%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi I dalam kategori baik, dari 22 program tersebut semuanya berperan penting dalam mendukung pencapaian target kinerja dan ini menunjukkan bahwa Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat semakin meningkat. Keberhasilan misi I dapat dilihat dari peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia.



Kinerja IPM Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 berhasil mendekati IPM Nasional dan menjadi yang Kabupaten terbaik kedua di Provinsi Lampung yaitu 74,16.

2. Pada Misi II terdapat 24 program dan 13 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,82%. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja beberapa program yang mendukung misi II, yaitu:
 - ✓ Pada tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi telah melakukan pembangunan, dengan rincian:

Pembangunan jalan 5,343 Km, Rekonstruksi Jalan 31,815 Km, Pemeliharaan berkala jalan 11,098 Km, pemeliharaan rutin jalan 11,098 Km, Pembangunan Jembatan 6 m, pemeliharaan rutin jembatan 114 m dan pembangunan Talud/Drainase/Plat Dekker 21.624 m.

✓ Pada Tahun 2024, dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan program/kegiatan, diantaranya:

- a) Menurunnya permukiman Kumuh dari total luasan 42,68 Ha menurun menjadi 6,67 Ha;
- b) Perbaikan 150 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR);
- c) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan melakukan pembangunan SPAM komunal di 10 (sepuluh) lokasi dan 13 unit sumur pompa mesin serta hidran umum yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
- d) Pembangunan bilik kamar mandi dan tanki septik pada 6 (enam) kampung dengan total pembangunan 311 unit.

3. Pada Misi III terdapat 48 program dan 10 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,06%. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja beberapa program yang mendukung misi III, yaitu:

✓

- ✓ Peningkatan Investasi tahun 2024 sebesar 30,42%. Terdapat peningkatan realisasi investasi di tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 39.597.715.358.326,- jika dibandingkan di tahun 2022 sebesar Rp. 30.362.319.958.982,-.
- ✓ Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 penduduk miskin sebesar 10,65% dan menurun sebesar 0,28% di Tahun 2024 menjadi 10,37%.
- ✓ Tahun 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,51 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 73,32%. Angka ini masih lebih ditinggi dari TPT Provinsi Lampung sebesar 70,41.
- ✓ Indeks Desa Membangun adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu desa dalam melakukan pembangunannya. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah indeks komposit (kombinasi) yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM Kabupaten Lampung Tengah berpredikat “MAJU” dengan nilai 0,749 dan berhasil mempertahankan posisi diatas rata-rata IDM Provinsi Lampung, serta mulai mewujudkan Desa Mandiri sebanyak 48 Kampung dan Desa Maju sebanyak 189 Kampung dari total 301 kampung.
- ✓ Produksi komoditas padi mengalami peningkatan sebesar 3,98 persen yaitu dari 588.384,90 ton pada tahun 2023 menjadi 600.907 ton tahun 2024.

- ✓ Produksi Tebu tahun 2024 mencapai 709.145 ton atau meningkat 641.861 ton dari target yang telah ditentukan sebesar 67.284 ton atau tercapai 1.053,96 persen;
- ✓ Produksi Lada tahun 2024 mencapai 114 ton atau meningkat 8 ton dari target yang telah ditentukan sebesar 106 ton atau tercapai 107,09 persen
- ✓ Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan ternak besar maupun kecil. Berdasarkan pencapaian dari sasaran strategis di bidang pertanian (subsektor peternakan) dapat dilihat dari perkembangan jumlah populasi ternak

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Populasi Ternak 2023 dan 2024

No.	Jenis Ternak	Populasi Ternak 2023-2024		
		Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Sapi Potong	374.631	422.571	393.363
2.	Kambing dan domba	378.879	326.348	397.823
3.	Ayam Buras	1.048.527	1.097.800	1.079.983
4.	Ayam Ras Pedaging	3.020.702	1.175.752	3.111.323
5.	Ayam Ras Petelur	1.459.218	1.010.974	1.502.995

Sumber: Lakip Disbunnakan Tahun 2024

Pada tahun 2024 jumlah produksi daging mencapai 13.767 ton meningkat dibanding tahun 2023 sebanyak 13.491 ton dan produksi telur pada tahun 2024 mencapai 25.601 meningkat dibanding tahun 2023 sebanyak ton 24.855 ton

4. Pada Misi IV terdapat 9 program dan 3 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi IV dalam

kategori sangat baik, dari 9 program tersebut semuanya berperan penting dalam mendukung pencapaian target kinerja dan ini menunjukkan bahwa Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah semakin meningkat.

5. Pada Misi V terdapat 22 program dan 6 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,21% Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi V dalam kategori sangat baik dan mendukung keberhasilan Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024 alokasi anggaran sebesar Rp. 2.646.700.980.556,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.452.465.973.515,- dengan capaian 92,66%. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 125 Program, yang terdapat pada misi 1 sampai dengan misi 5. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan per Misi secara rinci sebagaimana berikut:

Misi I memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 374.167.038.785,- dan teralisasi sebesar Rp. 323.775.441.660,- dengan capaian 86,53 persen.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Misi I Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.395.936.330	1.350.754.539	96,76
		Program Perlindungan Perempuan	81.000.000	76.180.000	94,05
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	181.050.000	161.097.000	88,98
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	481.601.300	234.168.587	48,62
	Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	Program Perlindungan Khusus Anak	406.000.000	203.899.235	50,22
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	383.850.000	346.048.300	90,15
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.288.968.500	6.516.120.365	89,40
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	300.000.000	100,00
2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	909.904.900	842.113.993	92,55
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	110.677.700	108.628.962	98,15
		Program Pengelolaan Kearsipan	139.321.500	127.369.604	91,42
	Rata-rata lama sekolah (MYS)	Program Pendidik dan tenaga pendidik	831.715.800	658.378.600	79,16
	Lama harapan sekolah (EYS)	Program Pengelolaan Pendidikan	173.470.848.000	169.344.953.815	97,62
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.450.430.800	1.187.438.600	81,87
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2.207.847.400	2.109.829.645	95,56
3 Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	170.504.549.065	129.607.027.653	76,01
	Prevalensi intervensi stunting	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.840.453.990	1.457.963.270	79,22
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	483.436.500	446.962.600	92,46

			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.210.203.000	661.265.400	54,64
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	416.400.000	241.793.850	58,07
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4.493.844.000	3.230.657.850	71,89
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.579.000.000	4.562.789.792	81,79
JUMLAH PROGRAM			Program : 22			
JUMLAH ANGGARAN				374.167.038.785	323.775.441.660	86,53

Misi II memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 180.077.697.495,- dan teralisasi sebesar Rp. 170.786.366.645,- dengan capaian 94,84 persen.

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Misi II Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	124.108.169.510	119.144.022.181	96,00
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	239.898.000	231.513.572	96,51
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.873.551.250	1.810.216.748	96,62
		Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Pelayaran	57.350.000	57.350.000	100,00
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	10.727.938.402,00	9.528.578.945,25	88,82
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.784.928.600	7.552.623.445	97,02

		Rumah tidak layak huni	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.201.726.474	4.155.389.084	98,90
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	250.000.000	244.944.312	97,98
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	Program Penataan Bangunan Gedung	22.516.586.921	20.162.198.932	89,54
			Program Pengembangan Perumahan	27.431.900	25.431.900	92,71
			Program Pengembangan Permukiman	99.999.938	37.049.585	37,05
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.052.887.700	3.046.671.671	99,80
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2.082.945.500	2.053.222.819	98,57
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	385.000.000	370.036.220	96,11
		Indeks kualitas udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	652.379.000	607.370.219	93,10
		Indeks kualitas lahan	Program Pengendalian Bahan Berba-haya & Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berba-haya & Beracun (Limbah B3)	36.341.000	27.825.700	76,57
			Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	325.527.600	319.145.000	98,04
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18.770.000	17.643.700	94,00
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.385.500	9.244.850	98,50
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	370.000.200	335.453.674	90,66

			Program Pengelolaan Persampahan	734.480.000	702.698.549	95,67
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	274.062.700	225.004.338	82,10
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	25.715.500	25.488.850	99,12
			Program Penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	222.621.800	97.242.350	43,68
JUMLAH PROGRAM			Program : 24			
JUMLAH ANGGARAN				180.077.697.495	170.786.366.645	94,84

Misi III memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 31.413.257.550,- dan teralisasi sebesar Rp.28.480.878.759,- dengan capaian 90,67 persen.

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Misi III Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	976.204.500,00	783.468.906,00	80,26
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	77.723.000,00	71.018.765,00	91,37
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	123.045.000,00	119.562.586,00	97,17
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	370.646.400,00	337.392.800,00	91,03
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.739.639.600,00	6.462.856.364,45	95,89
		Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.233.256.000,00	1.167.269.200,00	94,65

			Program Penyuluhan Pertanian	1.330.380.200,00	1.159.653.100,00	87,17
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	205.244.000,00	180.104.350,00	87,75
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	309.226.000,00	282.686.053,00	91,42
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	985.675.500,00	923.079.150,00	93,65
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	60.049.500,00	54.724.900,00	91,13
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	252.283.700,00	228.477.791,00	90,56
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.586.631.400,00	1.464.342.042,00	92,29
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.673.899.400,00	2.998.874.319,20	81,63
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	190.350.000,00	179.633.130,00	94,37
			Program Penyuluhan Pertanian	771.801.100,00	668.347.093,00	86,60
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	197.250.000	170.116.756	86,24
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	801.355.000	767.799.176	95,81
			Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	135.662.200	100.854.102	74,34
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	128.771.500	120.486.000	93,57
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	178.654.800	176.521.350	98,81
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	156.280.700	144.753.296	92,62
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100.450.000	89.031.500	88,63
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	650.004.900	645.837.669	99,36
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	43.089.000	31.455.000	73,00

			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	113.543.000	92.317.649	81,31
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.742.217.900	2.577.457.635	93,99
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	135.689.000	107.830.400	79,47
			Program Pemasaran Pariwisata	489.316.500	320.308.200	65,46
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	291.645.000	262.820.500	90,12
4	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	Program Promosi Penanaman Modal	415.606.500	415.144.150	99,89
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	580.092.000	489.779.100	84,43
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20.800.000	17.990.300	86,49
			Program Pelayanan Penanaman Modal	51.840.500	49.161.350	94,83
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	74.773.900	72.312.300	96,71
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.500.000	0,00	0,00
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	746.806.250	667.278.765	89,35
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.547.047.000	1.523.475.000	98,48
			Program Administrasi Pemerintah Desa	523.087.000	475.942.302	90,99
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	92.405.100	86.910.400	94,05
			Program Penempatan Tenaga Kerja	115.538.700	106.964.700	92,58
			Program Hubungan Industrial	94.275.400	79.431.000	84,25
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	201.151.000	181.113.236	90,04
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	77.345.000	52.186.650	67,47

7	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Program Pemberdayaan Sosial	490.210.600	452.024.728	92,21
			Program Rehabilitasi Sosial	591.112.700	489.594.867	82,83
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	412.847.400	371.399.880	89,96
			Program Penanganan Bencana	326.833.700	261.090.248	79,88
JUMLAH PROGRAM			Program : 48			
JUMLAH ANGGARAN				31.413.257.550	28.480.878.759	90,67

Misi IV memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 63.717.503.544,- dan teralisasi sebesar Rp. 61.714.029.115,- dengan capaian 96,86 persen.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Misi IV Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	3.072.634.644	2.939.793.894	95,68
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.054.575.000	925.696.000	87,78
			Program pembudayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	56.529.501.500	56.183.003.500	99,39
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	254.916.000	254.916.000	100,00
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	269.130.200	235.983.450	87,68
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	550.607.800	536.971.166	97,52

	berbangsa dan bermasyarakat					
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.281.879.000	38.819.000	3,03 -
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	482.842.200	408.439.905	84,59
			Program Penanggulangan Bencana	221.417.200	190.406.200	85,99
JUMLAH PROGRAM			Program : 9			
JUMLAH ANGGARAN				63.717.503.544	61.714.029.115	96,86

Misi V memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 1.997.325.483.182,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.867.709.257.337,- dengan capaian 93,51 persen.

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Misi V Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	510.085.940.680	500.550.363.337	98,13
		Indeks SPBE	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	900.531.250	493.925.041	54,85
		Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.669.309.100	3.526.969.035	96,12
		Indek Inovasi Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	617.359.700	501.919.813	81,30
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.082.954.500	2.072.146.506	99,48
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.152.654.047	1.145.686.400	99,40

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Kabupaten Lampung Tengah 2024

			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	96.276.000	86.111.626	89,44
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	19.924.000	19.397.525	97,36
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.922.600.400	1.588.440.796	82,62
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.888.553.075	1.654.754.528	87,62
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.213.361.933	2.944.172.633	91,62
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	21.112.712.890	20.508.457.476	97,14
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.773.664.100	1.444.805.542	81,46
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.407.305.909.874	1.294.318.698.303	91,97
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	1.766.207.700	1.405.000.401	79,55
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	143.046.600	124.218.804	86,84
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Program Pendaftaran Penduduk	126.680.000	96.533.400	76,20
			Program Pencatatan Sipil	118.148.200	108.455.500	91,80
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	139.011.000	96.782.000	69,62
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.866.500	14.753.550	92,99
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	38.947.420.633	34.803.317.921	89,36
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	227.351.000	204.347.200	89,88-
JUMLAH PROGRAM			Program : 22			
JUMLAH ANGGARAN				1.997.325.483.182	1.867.709.257.337	93,51

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan tolak ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026. Sangat disadari laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Penyempurnaan laporan dimasa yang akan datang akan terus dilakukan agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Secara umum Pencapaian Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 berdasarkan pengukuran kinerja sasaran pada tingkat hasil (*outcomes*) telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut: Misi 1 dengan rata-rata capaian kinerja 88,27%, misi 2 rata-rata capaian kinerja 100,82%, misi 3 rata-rata capaian kinerja 101,06%, misi 4 rata-rata capaian kinerja 100% dan misi 5 rata-rata capaian kinerja 104,21%. Keberhasilan pencapaian sasaran ditunjukkan dari pencapaian kinerja

kegiatan pada masing-masing sasaran serta ditunjang oleh data-data indikator kinerja makro dari masing-masing sasaran.

Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan, alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran juga secara umum dapat terealisasi sesuai dengan target atau tingkat capaian yang diharapkan. Pada Tahun Anggaran 2024 alokasi anggaran sebesar Rp. 2.646.700.980.556,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.452.465.973.515,- dengan capaian 92,66%. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 125 Program. Upaya pencapaian sasaran sesuai Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024, telah diupayakan secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, namun demikian berbagai permasalahan/kendala sering terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga perlu diupayakan jalan keluar/solusi untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Kiranya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 ini, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan kinerja. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

4.2. SARAN-SARAN

Dari permasalahan yang dihadapi dan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, maka perlu disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemantauan atas pencapaian kinerja dilevel Perangkat Daerah;
2. Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target, perlu dilakukan evaluasi, agar ditemukan akar permasalahannya;
3. Perlu dilakukan penetapan ulang untuk target indikator, untuk indikator yang tidak memenuhi
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil dan implementasi program, sehingga terjadi keselarasan antara kegiatan, hasil program dengan sasaran strategis pada setiap Perangkat Daerah;
5. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dalam menerapkan manajemen kinerja melalui pengintegrasian system perencanaan kinerja dan penganggaran serta membangun mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu, sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan juga sebagai pemberian *reward* and *punishment*;
6. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan aparatur di Kabupaten Lampung Tengah dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk prioritas

pembangunan dan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran;

8. Perlunya adanya regulasi terkait reward dan punishment kepada Perangkat Daerah dengan melihat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, agar menjadi semangat Perangkat Daerah dalam memperbaiki implementasi SAKIP kedepannya.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



ARDITO WIJAYA

LAMPIRAN

MATRIKS PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Visi: Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya									
Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat									
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,16	70,65	71,14	71,63	72,12	72,61	73,08
Sasaran 1: Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indek	89,87	90,27	90,68	91,08	91,49	91,89	92,29
	Presentase cabang olahraga yang berprestasi pada event nasional (jenis)	Persen	17,86	17,86	21,43	25	28,57	32,14	32,14
Sasran 2: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Rata-rata lama sekolah (MYS)	Tahun	7,58	7,6	7,62	7,64	7,66	7,68	7,7
	Lama harapan sekolah (EYS)	Tahun	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	12,97	12,98
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek	N/A	N/A	13	14	15	16	17
Sasaran 3: Meningkatnya aksesibiltas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	Tahun	69,84	69,94	70,04	70,14	70,24	70,34	70,44
	Prevalensi intervensi stunting	Persen	13,34	12,7	12,06	11,42	10,78	10,14	9,5
Sasaran 4: Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,71	0,66	0,61	0,56	0,51	0,46	0,41
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	N/A	N/A	57	60	64	67	70
Visi: Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya									
Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa									

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 1: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Cakupan rata-rata peningkatan kondisi infrastruktur	Persen	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	85,67
	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	Persen	3,16	16,95	30,73	44,52	58,30	72,09	85,87
	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	52	61,83	62,41	63,00	63,58	64,16	64,74
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5
	Tingkat aksesibilitas jalan kabupaten	Persen	86,36	88,36	89,36	90,36	91,36	92,36	93,36
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	82	83	85	85	86	86	86
	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C	0,57	0,58	0,6	0,6	0,62	0,63	0,63
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Presentase luas areal sawah yang terairi jaringan irigasi	Persen	91,87	92,79	93,72	94,65	9560	96,56	97,52
	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	Persen	93,02	94,2589	95,498	96,737	97,976	99,2152	99,2152
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah Luas kawasan kumuh	Ha	61,77	52,33	43,61	34,89	26,17	17,45	8,73
	Rumah layak Tidak huni	Persen	27,18	23,74	21,74	17,40	13,92	11,13	8,91
	Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	Persen	89,5	89,6	91,6	93,28	94,62	95,7	96,56
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	Persen	94,3	94,44	95,44	96,35	97,08	97,67	98,13
Sasaran 5: Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya	Indeks kualitas lingkungan air	IKA	55	74	74,5	75	75,5	76	76,5

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	IKU	72	85	86	87	88	89	90
	Indeks tutupan lahan	ITL	30	31	32	33	34	35	36
Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang	Persen	78	78	80	82	84	86	88
Visi: Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya									
Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan									
Tujuan 1: Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,02	0,1	1,2	2,2	3,3	4,4	5,5
	Indeks Gini	Indeks	0,304	0,299	0,293	0,288	0,282	0,277	0,271
	PDRB Perkapita (Juta)	Juta	55,48	56,88	58,28	59,68	61,08	62,48	63,88
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,22	3,86	3,5	3,14	2,78	2,42	2,08
	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,82	11,52	11,22	10,92	10,62	10,32	10
Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Skore PPH	Score	85,2	86,1	86,7	87,2	88	88,5	89
	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	Persen	36,09	36,4	36,8	37	37,3	37,7	38
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,74	10	11	11,5	12	12,5	13
	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dalam PDRB	Persen	22,54	22,9	23,3	23,7	24	24,5	25
Sasaran 2: Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,7	8,9

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sasaran 3: Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	Persen	18,04	20	20	20	20	20	20
Sasaran 4: Meningkatkan iklim investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	Persen	8,7	10	10	10	10	10	10
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	Indek	0,6932	0,7141	0,735	0,7559	0,7768	0,7977	0,8186
Sasaran 6: Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,05	73,48	73,9	74,33	74,75	75,18	75,6
Sasaran 7: Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	N/A	4	4	4	4	4	20
Visi: Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya									
Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah									
Tujuan 1: Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas (per 10000)	Rasio	4,5	4,25	4	3,75	3,5	3,25	3
	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	N/A	N/A	N/A	72	73	74	75
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian konflik sosial	Kali	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sasaran 2: Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	Persen	N/A	10	10	10	10	10	10
Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indek	82	72,16	62,32	52,48	42,64	32,8	22,96
Visi: Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya									
Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
Tujuan 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	N/A	N/A	N/A	65	67	69	73
Sasaran 1: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks SPBE	Indek	N/A	2	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3
	Nilai AKIP Pemerintah Kab. Lampung Tengah	Predikat	B	B	BB	BB	A	A	A
	Indek Inovasi Daerah	Indek	1.705	1.725	1.745	1.765	1.785	1.800	1.820
Sasaran 2: Mewujudkan birikrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indek	55	56	57	58	59	60	61
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	85,01	85,01	86,72	88,81	89,47	90,1	90,5

SUMBER DATA INDIKATOR KINERJA PER SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
MISI I		
1 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan		
	Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	
		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
dan pelestarian budaya daerah	Rata-rata lama sekolah (MYS)	BPS
	Lama harapan sekolah (EYS)	
3 Meningkatnya aksesibilitas, kualitas	Usia harapan hidup	BPS
dan derajat kesehatan	Prevalensi intervensi stunting	Dinas Kesehatan
4 Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	BPS
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MISI II		
1 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	
2 Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
	Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	
3 Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	Dinas Sumber Daya Air
4 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya
	Rumah tidak layak huni	
	Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
5 Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas udara	
	Indeks kualitas lahan	
6 Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya
MISI III		
1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	BPS
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	
	Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	
2 Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Persentase peningkatan volume usaha Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3 Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Badan Pendapatan Daerah
4 Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
6 Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	BPS
7 Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Dinas Sosial
MISI IV		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
1 Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2 Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI V		
1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Bagian Organisasi
	Indek Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2 Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiain
3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Bagian Organisasi